



DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN



STOP GRATIFIKASI



**Bukan tentang nominal,
tapi tentang rezeki yang halal.
Kalau syukur tertanam di hati,
tak perlu terima gratifikasi.**

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 1 Tahun 2023
Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Kementerian Perhubungan



NEWSLETTER

infoHUBDAT

Berpikir Jernih Membangun Transportasi Darat

EDISI TRIWULAN 02 / 2023

INFO KHUSUS

Terminal Barang Internasional Motaain



KOMITMEN MEMBANGUN ANGKUTAN UMUM



DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN



Angkutan Lintas Batas Negara (ALBN) Kupang - Dili mulai beroperasi Maret 2023 dan diresmikan oleh Dirjen Perhubungan Darat Hendro Sugiarno, Gubernur NTT Viktor Laiskodat, serta Dirjen Transportasi dan Komunikasi Timor Leste Constantino Ferreira Soares. Menyuguhkan rute Kupang Nusa Tenggara Timur (NTT)-Dili Timor Leste PP setiap hari dengan jarak kurang lebih 400 kilo meter.

Sebuah bus DAMRI ALBN Kupang - Dili sedang melintas di Perbatasan RI - Timor Leste di Motaain, Nusa Tenggara Timur, 13/6/2023. Foto: HMS DJPD/WBW



Jam Operasional:
Setiap hari kerja
09.00 - 15.00 WIB

Layanan Pengaduan Ditjen Hubdat

Khusus Pengaduan Pelayanan

Pelabuhan Penyeberangan

Terminal Penumpang Tipe A

Jembatan Timbang/UPPKB

* yang dikelola oleh Direktorat Jenderal Perhubungan Darat

Tata Cara Melapor:



Hubungi nomor 151 atau WhatsApp ke nomor 0811 999 2900 dan isi identitas diri



Uraikan laporan / pengaduan dengan lengkap dan jelas



Lampirkan bukti pendukung apabila tersedia



Kirimkan laporan / pengaduan



Petugas akan menjawab laporan / pengaduan



Assalamualaikum Wr.Wb.

Apa kabar pembaca setia *Newsletter* infoHUBDAT yang budiman? Kita bertemu kembali melalui media *Newsletter* infoHUBDAT sebagai wadah untuk menjalin tali silaturahmi dan berbagi informasi. Teriring salam hangat dan doa kepada pembaca sekalian semoga selalu sehat dan dalam lindungan Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa. Ada beberapa hal yang perlu saya tekankan, dengan harapan dapat menjadi penyemangat kita bersama dalam memberikan pelayanan jasa transportasi darat kepada masyarakat.

Pembaca yang budiman, pemerintah berkomitmen untuk terus mendorong pengembangan dan pembangunan angkutan umum. Kota yang maju bukan tempat di mana orang miskin dapat membeli mobil pribadi, tetapi tempat di mana orang kaya menggunakan transportasi publik (Enrique Penalosa, Walikota Bogota, 1998 - 2000). Pemerintah pusat dan pemerintah daerah harus bersinergi dan berkolaborasi dalam menyelenggarakan angkutan umum yang selamat, aman, nyaman, dan terjangkau bagi masyarakat.

Seperti yang telah disampaikan oleh Presiden Joko Widodo dalam konferensi pers yang disiarkan secara daring pada 12/6/2023 bahwa status pandemi Covid-19 dicabut, kini kita mulai memasuki masa endemi. Meski demikian, masyarakat diminta untuk tetap berhati-hati serta terus menjalankan perilaku hidup sehat dan bersih. Tentunya dengan keputusan ini pemerintah berharap perekonomian nasional akan bergerak semakin baik dan meningkatkan kualitas kehidupan sosial ekonomi masyarakat.

Terkait hal tersebut, Kementerian Perhubungan secara resmi melakukan penyesuaian aturan perjalanan pada masa transisi endemi Covid-19. Masyarakat kini diperbolehkan tidak memakai masker saat menggunakan moda transportasi, dengan catatan harus dalam keadaan sehat dan tidak berisiko tertular atau menularkan Covid-19. Untuk moda transportasi darat, telah diterbitkan Surat Edaran Nomor 14 Tahun 2023 yang ditujukan kepada otoritas serta pengelola sarana dan prasarana transportasi sebagai pedoman penerapan protokol kesehatan bagi para pengguna jasa transportasi, baik sebelum dan saat melakukan perjalanan.

Selain itu, penyelenggaraan Angkutan Lebaran 2023 telah selesai dilaksanakan. Hajat besar pemerintah yang rutin berlangsung setiap tahun ini tentu menjadi perhatian semua kalangan. Seorang pengamat transportasi mengatakan bahwa secara umum, penyelenggaraan transportasi lebaran 2023 tergolong lancar dan dapat memenuhi harapan masyarakat yang melakukan perjalanan mudik lebaran. Berdasarkan data dari Kepolisian, angka kecelakaan lalu lintas selama puncak arus mudik turun 33% dibandingkan periode sebelumnya.

Akhir kata, saya sampaikan imbauan untuk selalu menjaga kebersihan dan menerapkan protokol kesehatan, baik diri pribadi maupun lingkungan sekitar. Bagi rekan-rekan yang harus bertugas di lapangan, saya sampaikan apresiasi dan terimakasih. Inilah saatnya kita membuktikan bahwa eksistensi kita berguna bagi masyarakat, bagi bangsa dan negara tercinta. Tetap semangat dan tetap sehat. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan rahmat dan hidayah-Nya pada kita semua. Amin.

Wassalamualaikum Wr.Wb.

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT

DRS. HENDRO SUGIATNO, M.M.



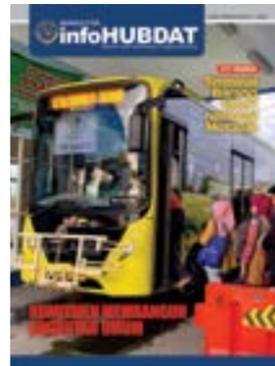


Foto Cover:
BPTD Kelas 2 Kalimantan Selatan / Hamsin
Sejumlah penumpang hendak menaiki bus Trans Banjarbakula di Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Program Angkutan Umum Perkotaan dengan skema *Buy The Service* di Banjarmasin sangat diminati masyarakat. Trans Banjarbakula memiliki *load factor* sebesar 50,85 persen pada triwulan 1 tahun 2023, cukup tinggi bila dibandingkan dengan kota-kota besar lainnya.

PENANGGUNG JAWAB
Amirulloh

REDAKTUR PELAKSANA
Aznal

REDAKTUR UTAMA
Herman Wibowo
Sari Hayu Hutami
Didik Prasetyo

REDAKTUR
Ardian Sukmaji
Ratna Syaka Aprilida
Dinda Siahaan
Alvia Lillian
Hanna Suryadika

DESAIN GRAFIS DAN FOTOGRAFI
M. Aulia Dharna
Bayu Adi Saputro
Rinjani Pangestu

SEKRETARIAT
Bejo Sri Wahono
Bambang Widiyanto
Gea Suketcha
Ely Rusnita
Yudha Kurniawan
Kurniadi Zaini
Rifai Dyan Armananta
Rusdinal
M. Farid Ardiansyah
M. Fadil Imaddudin
Achmad Maulana
Achmad Nanang
Rosmala Damayanti
Reza Saputra
Nurfadilah Sintia Ningrum
Ade Yunita
Ardianto
Rina Noviana
Septriana Dia Areta
Virsia Rosadya
Septiani



Diterbitkan oleh:

Humas Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Gedung Karya Lantai 12 Jl. Medan Merdeka Barat No. 8

Jakarta Pusat 10110
Telp./Fax. : (021) 3506141

email : humas.hubdat@gmail.com

website : <http://hubdat.dephub.go.id/>

@hubdat151

ditjen perhubungan darat

@ditjen_hubdat

ditjen perhubungan darat

@ditjen_hubdat

Info Redaksi

Pembaca *Newsletter* infoHUBDAT yang budiman,

Ditjen Perhubungan Darat mengeluarkan SE Nomor 14 Tahun 2023 Tentang Protokol Kesehatan Pelaku Perjalanan Orang dengan Transportasi Darat pada Masa Transisi Endemi Covid-19. Dalam SE 14 Tahun 2023 disebutkan bahwa kini masyarakat diperbolehkan tidak menggunakan masker jika dalam keadaan sehat dan tidak berisiko terhadap Covid-19.

Para pembaca yang budiman, pada edisi triwulan kedua kali ini, *Newsletter* infoHUBDAT menyuguhkan Laporan Utama mengenai bagaimana komitmen pemerintah mengembangkan dan membangun angkutan umum. Pemerintah pusat dan pemerintah daerah harus bersinergi dan berkolaborasi dalam menyelenggarakan angkutan umum yang selamat, aman, dan nyaman bagi masyarakat.

Kemudian, kami sajikan pula liputan khusus mengenai Terminal Barang Internasional (TBI) di Motaain. TBI Motaain berfungsi untuk mengoptimalkan pengawasan angkutan barang di perbatasan RI - Timor Leste dan mengkonsolidasi arus ekspor impor logistik. Disusul kemudian ulasan mengenai Angkutan Lintas Batas Negara RI - Timor Leste yang beroperasi setiap hari dengan jarak tempuh +- 400 km, dengan rute Kupang - Dili.

Sebuah tulisan dari pengamat transportasi mengenai Evaluasi Penyelenggaraan Angkutan Lebaran 2023 yang secara umum telah berjalan lancar dan memenuhi harapan masyarakat. Dibuktikan dengan menurunnya angka kecelakaan selama masa angkutan lebaran 2023 serta testimoni positif dari masyarakat yang melakukan perjalanan baik mudik maupun balik.

Tak kalah menarik, artikel tentang Dukungan Ditjen Perhubungan Darat pada penyelenggaraan KTT Asean ke-42 di Labuan Bajo. Dukungan tersebut antara lain berupa penyediaan *shuttle* bus bagi para delegasi dan peserta selama acara berlangsung, sejumlah fasilitas keselamatan dan perlengkapan jalan seperti penerangan jalan umum, *water barrier*, *guardrail* dan juga halte bus.

Kami tampilkan pula laporan tentang *Ground Breaking* Pembangunan Terminal Purworejo dan Terminal Cepu. Proyek di bidang prasarana transportasi jalan ini nantinya diharapkan dapat mendorong minat masyarakat kembali menggunakan angkutan umum.

Berbagai kegiatan yang dilakukan oleh unit kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat pun telah kami himpun dan kami sajikan kepada pembaca sekalian dalam infoSelintas. Di bagian akhir, kami sajikan rekaman gambar peristiwa dan kegiatan unit kerja terkait melalui bidikan lensa. Semoga apa yang kami sajikan ini dapat memperkaya wawasan dan pengetahuan para pembaca sekalian. (*)



daftar isi

EDISI TRIWULAN 02 / 2023

Angkutan Lintas Batas Negara (ALBN) RI - Timor Leste rute Kupang - Dili mulai beroperasi pada bulan Maret 2023. Keberadaan ALBN sangat membantu mobilitas masyarakat di sekitar wilayah perbatasan kedua negara.

Sebuah bus DAMRI Angkutan Lintas Batas Negara rute Kupang - Dili sedang melintas di Pos Lintas Batas Negara Motaain, Nusa Tenggara Timur, 13/6/2023. Foto: HMS DJPD/WBW



Info Utama

04 KOMITMEN MEMBANGUN ANGKUTAN UMUM

07 Krisis Angkutan Umum
Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik nampak bahwa telah terjadi krisis angkutan umum. Jumlah angkutan perkotaan tak sampai 0,2 persen dari total.

Kota yang maju bukanlah kota di mana orang miskin menggunakan mobil pribadi, melainkan kota yang bahkan membuat orang kaya menggunakan transportasi umum.



Info Selintas

- 39**
- Pencanangan Zona Integritas Menuju Predikat WBK dan WBBM
 - Libur Panjang Waisak, Ditjen Hubdat-Korlantas Polri Batasi Operasional Angkutan Barang
 - Ditjen Hubdat *Launching* Surat Persetujuan Berlayar (SPB) Online
 - Tingkatkan Efisiensi dan Efektivitas Organisasi, Ditjen Hubdat Bentuk BPTD di 33 Provinsi
 - Ditjen Hubdat - Korlantas Polri Batasi Operasional Angkutan Barang Selama Libur Idul Adha
 - Menhub Cek Pelayanan Angkutan Massal di Pekanbaru
 - Perbarui Syarat Perjalanan Darat, Ditjen Hubdat Terbitkan SE 14/2023
 - Pertemuan *The 35th Meeting Of The ACCSQ Automotive Product Working Group (ACCSQ APWG)*

Info Khusus

- 08 Terminal Barang Internasional Motaain**
10 ALBN Kupang - Dili Permudah Mobilitas Masyarakat
12 Evaluasi Angkutan Lebaran 2023
16 Dukungan Ditjen Hubdat pada KTT Asean ke-42

Info Sarana

- 24 E-SRUT Rancang Bangun Kendaraan Bermotor**
25 Menhub Apresiasi Skuter Listrik Hasil Konversi Karya Anak Bangsa
Info Prasarana
28 Pembangunan Terminal Purworejo Baru
30 *Ground Breaking* Terminal Cepu

Info Angkutan

- 18** Merger PPD - DAMRI, Tingkatkan Konektivitas Transportasi
20 Percepatan Pengelolaan Angkutan Massal Berbasis Jalan
22 Dirjen Hubdat Tekankan Keselamatan Bagi Mitra Ojek Online
26 Upaya Elektrifikasi Angkutan Umum

Info Lalu Lintas

- 32** Profesionalisme PPNS LLAJ: Sebuah Keharusan

Info TSDP

- 34** Berbenah Angkutan Sungai Danau
36 Kesiapan Pelabuhan Penyeberangan Jadi Lebih Baik

Lensa Hubdat

- 43** Rekaman Berbagai Peristiwa yang Terjadi di Lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan Melalui Bidikan Lensa

KOMITMEN MEMBANGUN ANGKUTAN UMUM

Kota yang maju bukanlah kota di mana orang miskin menggunakan mobil, melainkan kota yang bahkan membuat orang kaya menggunakan transportasi umum (Enrique Penalosa, Walikota Bogota 1998-2000)

Saat ini, DKI Jakarta merupakan daerah yang dinilai paling representatif untuk digunakan sebagai contoh bagi kota-kota lain di Tanah Air, karena dengan adanya Bus Trans Jakarta yang telah terhubung angkutan *feeder* (Jaklingko) sebagai angkutan pengumpan. Serta dukungan kerjasama dari moda lain seperti KCI, MRT, LRT, Kereta Cepat yang terkoneksi atau terintegrasi.

Data dari PT Trans Jakarta (Mei 2023), saat ini Trans Jakarta memiliki 394,4 km panjang koridor dan 2.326,3 km non koridor. Dilayani oleh 19 operator dengan 4.265 armada, terdiri 167 *articulated bus*, 934 *single bus*, 293 *maxi bus*, 289 *low entry bus*, 107 *medium bus*, 2.419 *micro bus*, 28 *double decker bus*, 30 *low entry bus EV*, 100 *royal trans*, dan 26 *Transjakarta cares*. Terdapat 232 rute dengan 13 rute utama (busway) dan 8 tipe layanan.

Cakupan layanan Transjakarta tahun 2004, cakupan populasi terlayani 1,8 persen, tahun 2006 (2,1 persen), tahun 2007 (12,8 persen), tahun 2009 (16 persen), tahun 2010 (21,0 persen), tahun 2011 (21,5 persen), tahun 2013 (23,2 persen), tahun 2014 (23,6

persen), tahun 2015 (24,2 persen), tahun 2016 (36,0 persen), tahun 2017 (42,0 persen), tahun 2018 (63,0 persen), tahun 2019 (79,5 persen), tahun 2020 (82,4 persen), tahun 2021 (82,1 persen), dan tahun 2022 (88,2 persen).

Data dari PT Surveyor Indonesia sebagai Manajemen Pengelola Program Pembelian Layanan (*Buy the Service/BTS*) di 10 kota, sejak 1 Januari 2022 hingga 18 Mei 2023 sudah mengangkut 42.920.645 penumpang dengan tingkat isian (*load factor*) 48 persen.

Tingkat isian pada triwulan 1 tahun 2023 untuk Trans Metro Deli (Medan) sebesar 39,08 persen, Trans Musi Jaya di Palembang (23,71 persen), Bati Solo Trans di Surakarta (35,38 persen), Trans Jogja di Jogjakarta (46,68 persen), Trans Metro Dewata di Denpasar (31,88 persen), Trans Metro Pasundan di Bandung (50,78 persen), Trans Banyumas di Purwokerto (63,71 persen), Trans Semanggi di Surabaya (39,19 persen), Trans Mamminasata di Makassar (34,75 persen) dan Trans Banjarbakula di Banjarmasin (50,85 persen). Terjadi penurunan jumlah penumpang di saat mulai diterapkan berbayar.



1

1. Sebuah Bus Metrotrans sedang beroperasi di Jakarta. Metrotrans dan Minitrans berfungsi sebagai angkutan pengumpan Transjakarta.
2. Suasana lalu lintas di sebuah persimpangan di Jakarta, dengan latar *totem sign board* petunjuk arah. Layanan angkutan umum di Jakarta telah terintegrasi dengan baik.
3. Sebuah kendaraan angkot Jak Lingko di Jakarta. Angkot Jak Lingko menjadi *feeder* bagi Trans Jakarta.

Terjadi penurunan penumpang menggunakan BTS setelah digratiskan sejak beroperasi. Lantaran, pengguna mengeluarkan ongkos transportasi lebih mahal ketimbang menggunakan sepeda motor. Berpindah koridor harus membayar lagi. Agar warga akan kembali menggunakan BTS, maka mulai 1 Juli 2023 akan diupayakan sekali membayar walau berganti moda tarif tidak naik (selama 2 jam). Dan akan ada tarif terintegrasi layanan



2

untuk golongan khusus (pelajar, lanjut usia/lansia dan disabilitas) sebesar Rp 2 ribu. Bisa jadi setelah penerapan tarif baru akan terjadi penambahan warga menggunakan Bus BTS di 10 kota.

Rekomendasi
PT Surveyor Indonesia memberikan sejumlah rekomendasi terhadap penyelenggaraan angkutan



3

umum perkotaan dengan skema pembelian layanan ini. Pertama, diperlukan komitmen dari seluruh *stakeholder* khususnya Pemerintah Daerah dalam mendukung program layanan ini agar dapat berlanjut hingga memberikan manfaat kepada masyarakat.

Kedua, kesiapan skema pendanaan program BTS Ketika

operasional layanan Teman Bus diserahkan kepada pemerintah daerah beserta legalitas yang diperlukan. Ketiga, meningkatkan dan mendorong potensi demand dan shifting pengguna kendaraan pribadi ke BTS diantaranya melalui *push and pull strategy* serta mensosialisasikan BTS.

Keempat, revitalisasi prasarana mendukung layanan BTS.



transportasi tidak sebatas ramah dan nyaman, tetapi juga harus berkelanjutan dan mempermudah perpindahan dari satu moda ke moda lain (integrasi antarmoda) dan mendukung konektivitas antar titik CBD. Subsidi angkutan penumpang perkotaan diberikan dengan tujuan (a) stimulus pengembangan angkutan penumpang umum perkotaan, (b) meningkatkan minat penggunaan angkutan umum, dan (c) kemudahan mobilitas masyarakat di kawasan perkotaan.

Push and Pull Strategy

Push Strategy (Pemerintah Pusat), berupa subsidi Angkutan berupa Sarana maupun Prasarana, subsidi Angkutan berupa biaya operasional (BTS), dan lisensi operator dan sanksi kepada operator yang melanggar standar pelayanan.

dari kenyamanan penggunaan angkutan pribadi menuju angkutan massal. Kini kebutuhan

Kelima, menyiapkan *roadmap* keberlangsungan layanan BTS dan skema *handover* dan *capacity building*. Keenam, mempersiapkan kelembagaan manajemen pengelola yang akan melakukan monitoring dan evaluasi layanan dan kinerja operasional Teman Bus berikut dengan sistem teknologi.

Menjadi tugas kita bersama dalam berpindah (*shifting*)



Kebijakan *push and pull* yang dilakukan oleh pemerintah pusat dan daerah mendorong masyarakat untuk meninggalkan kendaraan pribadi dan menarik masyarakat untuk menggunakan angkutan umum.

Wilayah & Koridor Layanan:



Program *Buy The Service* dikemas dengan nama Teman Bus (Transportasi Ekonomis Mudah Aman dan Nyaman) yang diterapkan di 10 kota yakni Palembang, Medan, Bali, Surakarta, Yogyakarta, Makassar, Banyumas, Banjarmasin, Bandung dan Surabaya.

PETA LAYANAN TEMAN BUS

Sedangkan *Push Strategy* (Pemerintah Daerah), dapat berupa analisis Jaringan Angkutan Pengumpan (*feeder*), kebijakan Ganjil Genap, *bus priority* melalui *Area Traffic Control System*, pembatasan penggunaan kendaraan pribadi, pengaturan ruang jalan, pembatasan waktu kendaraan yang masuk ke kawasan tertentu, biaya parkir yang mahal, masuk berbayar di jalan protokol (*Electronic Road Pricing*), mewajibkan ASN pmda menggunakan angkutan umum saat bekerja, mengajak pelajar dan mahasiswa menggunakan angkutan umum.

Krisis Angkutan Umum

Telah terjadi krisis angkutan umum sangat nampak dari data yang diberikan Badan Pusat Statistik. Proporsi jenis kendaraan di Indonesia tahun 2021 total 141.992.573 unit kendaraan. Terdiri dari 120.042.298 unit sepeda motor (84,5 persen), mobil penumpang 16.413.348 unit mobil penumpang (11,6 persen), 5.299.361 unit mobil barang (3,7 persen) dan sisanya 257.565 unit bus (0,2 persen). Sudah pasti jumlah angkutan perkotaan kurang dari 0,2 persen, lantaran



Para penumpang hendak menaiki Bus Trans Metro Deli di Kota Medan. Rencananya Trans Metro Deli akan diambil alih pengelolannya oleh Pemerintah Kota Medan pada 2025.

masih ada angkutan umum antar kota antar provinsi (AKAP), angkutan umum antar kota dalam provinsi (AKDP) dan angkutan perdesaan yang populasinya sangat minim.

Hal ini menunjukkan populasi angkutan umum sangat minim sekali dan terbesar populasi sepeda motor yang sudah barang tentu akan menyedot penggunaan bahan bakar minyak

jauh lebih. Di sisi lain, Indonesia mengimpor BBM lebih dari 50 persen kebutuhan nasional. Belum lagi angka kecelakaan lalu lintas yang ditimbulkannya. Untuk menangani krisis angkutan umum perlu komitmen pemerintah dari pusat hingga daerah. (*)

Djoko Setijowarno, Akademisi Prodi Teknik Sipil Unika Soegijapranata dan Wakil Ketua Bidang Pemberdayaan dan Penguatan Kewilayahan Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Pusat



TERMINAL BARANG INTERNASIONAL MOTAAIN

Oleh: Tim Liputan infoHUBDAT

Untuk mengoptimalkan pengawasan angkutan barang lintas batas RI - Timorleste, Ditjen Perhubungan Darat melalui Balai Pengelola Transportasi Darat (BPTD) Kelas II Nusa Tenggara Timur (NTT) membangun Terminal Barang Internasional (TBI) di Motaain.

Fokus Pemerintah melalui Ditjen Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan pada keselamatan dan keamanan transportasi terus digalakkan. Semua wilayah menjadi perhatian dalam mewujudkan transportasi berkeselamatan tak terkecuali di daerah perbatasan antarnegara.

Tak hanya pada transportasi umum penumpang, angkutan barang juga menjadi pantauan Ditjen Perhubungan Darat, salah satunya di perbatasan antara Indonesia dan Timor Leste.

Hal itu mengingat banyaknya angkutan barang yang berlalu

lalu lintas membawa logistik dan komoditi lainnya, baik yang masuk maupun keluar (ekspor-impor) Indonesia.

Untuk mengoptimalkan pengawasan, Ditjen Perhubungan Darat melalui perpanjangan tangan di daerah yakni Balai Pengelola Transportasi Darat (BPTD) Kelas II Nusa Tenggara Timur (NTT) membangun Terminal Barang Internasional (TBI).

Lokasinya persis bersebelahan dengan Pos Lintas Batas Negara (PLBN) yang menghubungkan antara Indonesia dalam hal ini Motaain Atambua dengan Timor Leste.

Pembangunan terminal sebagai salah satu komponen dari sistem transportasi yang mempunyai fungsi utama sebagai tempat pemberhentian sementara kendaraan umum untuk menaikkan dan menurunkan penumpang dan barang hingga sampai ke tujuan akhir suatu perjalanan, juga sebagai tempat pengendalian, pengawasan, pengaturan dan pengoperasian di Kawasan Perbatasan Negara, Khususnya

terminal barang Motaain yang berada di luar Kawasan Perbatasan Negara.

Kasi Prasarana Jalan, Sungai, Danau dan Penyeberangan BPTD Kelas II NTT Musa Eliasar Thonak menyampaikan, hingga saat ini pembangunan TBI Motaain sudah mencapai 98%.

Pembangunannya sendiri sudah dimulai sejak pembebasan lahan di 2018. Dilanjutkan pembangunan area TBI mulai 2019 hingga 2023 ini.

“Adapun fasilitas yang dibangun di antaranya kantor, gudang ekspor-impor, gudang 1, rumah *genset*, rumah pompa + *ground tank*,” ujar Musa.

Selain itu dibangun juga area komersil, bangunan operator, WC umum, tempat istirahat pengemudi, area parkir kantor, rigid beton, bangunan operator, dan bengkel.

Ditargetkan pada Juli 2023 pekerjaan sudah rampung dan selanjutnya segera dapat dioperasikan untuk kepentingan bersama.

Penanggung jawab TBI Motaain Jefri Ragawino menyampaikan, penyelesaian pembangunan tinggal beberapa titik lagi.

“Seperti pagar akses untuk keluar masuk kendaraan,” ungkapnya.

Sedangkan sisi lainnya sudah tinggal finishing saja. Penerangan dan air juga sudah terealisasi.



Kendaraan angkutan barang melintas di Pos Lintas Batas Negara (PLBN) RI - Timor Leste di Motaain, Nusa Tenggara Timur, 13/6/2023. Foto: HMS/WBW

Bahkan pihaknya sangat bersyukur karena air bersih yang diperoleh di TBI Motaain sangat besar debitnya.

Nantinya salah satu tugas di TBI adalah melakukan penimbangan barang sesuai dengan dimensi dan kapasitas kendaraan.

Mengawasi kelebihan muatan dan mengarahkan untuk dilakukan penyesuaian demi keselamatan dan keamanan di jalan raya.

Menurutnya barang ekspor yang banyak dikirim di antaranya sembako, semen, dan furniture. Sedangkan barang impor dari Timor Leste yakni Biji Gawang yang jumlahnya mencapai 90% dari keseluruhan.

“Kami juga berkoordinasi dengan beacukai, pemilik, dan pabean dalam pengawasan di TBI Motaain ini,” tutur Jefri.

Harapan Warga

Adanya TBI Motaain memberikan cahaya terang bagi warga setempat. Wilayah mereka akan menjadi lebih hidup dan ramai.

Kasi Prasarana Jalan, Sungai, Danau dan Penyeberangan BPTD Kelas II NTT Musa Eliasar Thonak

Warga juga bangga dan senang karena keikutsertaan pihak Kemenhub pada aktifitas sosial di wilayahnya. Namun warga juga menaruh harapan besar kepada TBI Motaain dalam memajukan sumber daya manusia dan perekonomian.

Tokoh Lembaga Adat Meria Magdalena mengemukakan, agar pihak TBI Motaain melibatkan warga sekitar yang sudah memasuki usia kerja.

“Kami berharap pengelola TBI Motaain merekrut warga sekitar entah itu sebagai tenaga keamanan atau personel CS (*cleaning service*),” ujar Meria.

Diakuinya bahwa masyarakat di sekitar Motaain ini kebanyakan yang putus sekolah atau tidak melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi.

Dengan adanya TBI Motaain juga diharapkan warga dapat memanfaatkan area sekitar dengan berdagang.

“Terima kasih pemerintah, terima kasih Kemenhub, semoga warga kami juga bisa dilibatkan bekerja di TBI Motaain ini,” ungkap dia. (*)



ALBN KUPANG-DILI

Permudah Mobilitas Masyarakat

Oleh: Tim Liputan infoHUBDAT

Pemerintah terus meningkatkan kemudahan bagi masyarakat dalam melakukan mobilitas dengan menyediakan angkutan umum. Tidak hanya AKDP dan AKAP, ALBN pun menjadi perhatian pemerintah.

Kementerian Perhubungan melalui Ditjen Perhubungan Darat juga konsen dalam menghubungkan masyarakat di perbatasan antarnegara melalui konektivitas via darat.

Bersama pemerintah Timor Leste, awal tahun ini menjadi momen yang ditunggu-tunggu kedua negara dengan menghadirkan Angkutan Lintas Batas Negara (ALBN). ALBN ini mulai beroperasi Maret 2023 dan diresmikan oleh Dirjen

Perhubungan Darat Hendro Sugiatno, Gubernur NTT Viktor Laiskodat, serta Dirjen Transportasi dan Komunikasi Timor Leste Constantino Ferreira Soares. Menyuguhkan rute Kupang Nusa Tenggara Timur (NTT)-Dili Timor Leste PP setiap hari dengan jarak kurang lebih 400 kilo meter.

Dari Kupang ke Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Motaain ditempuh sedikitnya 6,5 jam. Selanjutnya usai pemeriksaan dokumen imigrasi dan

istirahat sejenak, perjalanan kembali ditempuh kurang lebih dua jam untuk tiba ke Dili.

Pengguna jasa dilayani armada bus dari dua operator Indonesia yakni Perum DAMRI dan Bagong. Satu asal Timor Leste yaitu Babadok.

DAMRI dua armada mikro bus, Bagong tiga mikrobis, dan Babadok dua unit siap mengantar masyarakat dengan kenyamanan dan mengutamakan keselamatan bertransportasi.

Biaya tiket perjalanan ditentukan yakni Rp350.000 dengan armada bus DAMRI dan Bagong. Sedangkan bagi pengguna jasa Bus Babadok, dikenakan tarif Rp400.000 per orang.

Penumpang dapat menikmati fasilitas bus berpendingin, *reclining seat*, wifi, musik dan karaoke, dan toilet. Dengan begitu diharapkan penumpang akan merasakan kenyamanan selama perjalanan. Saat ini menurut Kasi Sarana dan Angkutan Jalan, Sungai, Danau dan Penyeberangan, BPTD KLS II Nusa Tenggara Timur (NTT) Tulus Raharjo, peminat Bus ALBN terus meningkat sejak diluncurkan tiga bulan lalu.

“Di hari biasa (*weekday*) penumpang per bus rata-rata 30-35% dan di akhir pekan (*weekend*) bisa mencapai 70-80% dari kapasitas yang tersedia,” tutur Tulus belum lama ini. Penumpang dari Kupang, naik dari Terminal Internasional Bimoku. Keberangkatan

Kasi Sarana dan Angkutan Jalan, Sungai, Danau dan Penyeberangan, BPTD KLS II Nusa Tenggara Timur (NTT) Tulus Raharjo

mulai pukul 06.00 hingga 07.00 WITA menuju Dili, Timor Leste.

Biasanya menurut Tulus bus akan tiba di PLBN Motaain sekitar pukul 13.00-14.00 WITA. Selanjutnya itu akan dilakukan serangkaian pemeriksaan CIQ (*custom, immigration, quarantine*) oleh petugas terkait.

Setelah selesai, perjalanan akan dilanjutkan ke Dili, sebelum pintu gerbang PLBN ditutup pada pukul 16.00 WITA.

Profil Penumpang

Tulus menyebutkan, penumpang yang menggunakan perjalanan bus ALBN saat ini kebanyakan untuk urusan pribadi dan keluarga. Sedangkan urusan bisnis dan pekerjaan ada juga meski prosentasenya lebih sedikit.

Kepala Terminal Bimoku Hanok Dea menambahkan, produksi penumpang dari hari ke hari terus meningkat.

Bila dilihat prosentase dari jumlah penumpang asal Kupang dan Dili cukup ada perbedaan. “Dari laporan data harian, penumpang asal Dili ke Kupang lebih banyak daripada Kupang ke Dili,” ujar Hanok.

Hubungan kekeluargaan banyak menjadi alasan penumpang melakukan perjalanan dengan bus ALBN baik dari Kupang ke Dili maupun sebaliknya. “Terutama di akhir pekan, ada yang saling mengunjungi antarkeluarga, ada juga karena akan menghadiri undangan acara,” ulasnya.

Penumpang bus ALBN juga banyak yang bepergian dengan membawa tas besar atau koper selain tas tangan.

Seperti salah satunya penumpang



asal Dili yang akan menuju tujuan akhir Kupang, Berna.

Berna yang sudah tujuh tahun ikut suami di Dili saat ditemui di PLBN Motaain mengungkapkan, akan mengunjungi orang tuanya di Dili.

“Saya senang sekali saat tahu ada bus ALBN, karena biasanya saya pergi dengan travel,” ungkapnya.

Awal mulanya dia terinfo dari sang Ibu bahwa kini ada bus sehingga tak perlu berganti travel saat berada di perbatasan antara Timor Leste dan Indonesia melalui Motaain.

Menurutnya, sang Ibu juga yang dengan penuh kasih sayang memesankan tiket untuk dia dan suami berkunjung dari Dili ke Kupang.

“Nyaman dan senang karena tinggal duduk manis saja tak perlu ganti moda lagi,” imbuh dia.

Kemudahan Nyata

Administrator Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Motaain Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) Enggelberthus Klau, menyebutkan, kehadiran bus ALBN wujud kemudahan yang nyata.

Sebelumnya masyarakat yang ingin bepergian dengan angkutan umum hanya dapat mengandalkan travel saja, tak ada pilihan lain.

“Namun penumpang harus berganti travel pada saat tiba di PLBN,” jelas Enggelberthus. Saat pergantian itulah maka penumpang harus rela jalan sedikitnya satu kilometer dari turun di PLBN Motaain.

Selanjutnya berjalan sembari mengangkut barang bawaan untuk pemeriksaan CIQ dan melanjutkan jalan lagi hingga ke PLBN milik Timor Leste, baru kemudian naik travel berbeda.

Makanya tampak di PLBN Motaain petugas porter resmi yang menawarkan jasa angkut barang penumpang travel saat berganti moda. “Dengan adanya bus ALBN ini penumpang bisa lebih nyaman karena tak perlu repot ganti moda dan mengangkut barang jarak jauh,” ungkapnya.

Biasanya bus akan beristirahat sebentar di rest area PLBN Motaain. Tersedia kantin dan pasar yang bisa dikunjungi penumpang bus. “Pasar pascapandemi baru dibuka satu kali seminggu, yakni di Selasa. Nantinya akan direncanakan untuk dibuka setiap hari,” ucap Enggelberthus.

Dia berharap penumpang dapat meramaikan pasar dan berbelanja juga menikmati berbagai makanan dan minuman yang tersedia di kantin PLBN Motaain itu.

Berdasarkan data PLBN Motaain, sedikitnya penumpang bus dan travel setiap harinya mencapai 300 orang dan akan bertambah di akhir pekan.

Jumlah itu belum termasuk masyarakat dengan kendaraan pribadi atau angkutan barang yang setiap hari ada saja yang melintas.

Enggelberthus berharap ke depannya angkutan bus ALBN makin diminati dan jumlah penumpangnya terus bertambah dengan layanan yang tersedia. (*)



Jalan Tol Trans Jawa masih favorit pilihan pemudik. Kendati kapasitas jalan tol tidak akan dapat mengakomodir kebutuhan pemudik yang cukup besar. Alhasil, kemacetan pasti terjadi dan harus ada rekayasa lalu lintas (seperti ganjil genap, *contra flow* dan *one way*) upaya mengendalikan di jalan tol. Tidak hanya di jalan Tol Trans Jawa, namun di jalan arteri juga dilakukan hal yang sama, seperti di sistem satu arah (*one way*) ruas jalan Padang-Bukittinggi, Sumatera Barat.

Imbauan Presiden yang memungkinkan aparat sipil negara (ASN), personel TNI/Polri, dan pegawai BUMN untuk menambah cuti atau bekerja dari rumah sehingga bisa menunda kepulangan disampaikan pada 24 April lalu. Hal serupa dianjurkan bagi pegawai swasta sepanjang tidak ada kepentingan mendesak. Masyarakat diminta menghindari puncak arus balik yang diperkirakan berlangsung pada 24-25 April ini (Kompas.id, 26/04/2023). Selain itu adanya penerapan potongan tarif (*discount*) jalan tol 15-18 April 2023 dan 27-29 April 2023 oleh PT Jasa Marga, turut berpengaruh untuk mengurai pemerataan atau distribusi arus perjalanan mudik dan balik lebaran tahun ini. Pola mengatur arus balik sudah dimulai tahun lalu, dan tahun ini

EVALUASI ANGKUTAN LEBARAN 2023

Oleh: Djoko Setijowarno



Secara umum, penyelenggaraan transportasi lebaran 2023 tergolong lancar dan dapat memenuhi harapan masyarakat yang melakukan perjalanan mudik lebaran. Baik perjalanan mudik maupun balik. Dibanding musim Lebaran tahun 2022, terjadi penurunan angka kecelakaan lalu lintas 21 persen dan korban meninggal dunia 39 persen.

juga dilakukan, ada distribusi pergerakan hampir merata di rentang waktu arus balik.

Berdasarkan Realisasi Volume Penumpang dan Kendaraan Pulau Jawa - Sumatera Periode Angleb 2023 (1444 H) di Pelabuhan Bakauheni, dan Panjang Direktorat Jenderal Perhubungan Darat, menyebutkan selama musim mudik 10 hari (12-21 April 2023), jumlah arus mudik penumpang dan kendaraan

yang telah menyeberang dari Pulau Jawa menuju Pulau Sumatera, sebanyak 848.274 orang dan 195.984 unit kendaraan.

Dari Pelabuhan Penyeberangan Merak (Pulau Jawa) menuju Pelabuhan Penyeberangan Bakauheni (Pulau Sumatera), jumlah pemudik dari H-10 hingga H-1 untuk penumpang 796.261 orang (ada peningkatan 5 persen dibanding tahun 2022 sebesar

760.911 orang). Untuk kendaraan sebanyak 184.955 unit (terjadi penurunan 2 persen dibanding tahun 2022 sebesar 180.465 unit).

Kecelakaan menurun

Selama puncak arus mudik, jumlah kecelakaan yang terjadi mencapai 2.557 kasus, dengan korban meninggal mencapai 329 orang. Meski demikian, angka kecelakaan ini turun 33 persen dibandingkan periode sebelumnya. Berdasarkan data Korps Lalu Lintas (Korlantas) di Posko Angkutan Lebaran Terpadu, per 15-23 April atau H-7 hingga H+1 Lebaran, tercatat kecelakaan lalu lintas sebesar 2.557 kejadian. Jumlah ini menurun dari periode yang sama pada tahun 2022, yaitu 3.799 kejadian atau 33 persen. Jumlah korban meninggal juga turun 61 persen, yaitu 329 orang dari 873 jiwa. Sementara itu kerugian material ditaksir mencapai Rp 5,5 miliar, turun 20 persen dari periode lalu, yaitu Rp 6,99 miliar (Kompas.id, 24/04/2023).

Berdasarkan data pemberian santunan dari PT Jasa Raharja, selama Operasi Ketupat H -5 hingga H+4 (18 -27 April 2023), jumlah kecelakaan berdasarkan Laporan Polisi tahun 2023 ada 2.676 kejadian turun 25,60 persen dibanding tahun 2022 (3.597 kejadian). Sementara jumlah korban kecelakaan total tahun 2023 sebanyak 5.337 orang (turun 24 persen) dibanding tahun 2022 (6.982 orang).

Jumlah korban meninggal dunia terjamin sebanyak 612 orang di tahun 2023 (penurunan 38 persen) dibandingkan tahun 2022 sebanyak 993 orang. Jumlah korban luka-luka terjamin tahun 2023 sebesar 4.268 orang (ada penurunan 9 persen) dibandingkan tahun 2022 sebesar 4.704 orang. Kejadian kecelakaan lalu lintas tertinggi di Provinsi Jawa Timur dan terendah di Provinsi Maluku. Fatalitas dalam kecelakaan lalu lintas bukan sekadar persoalan statistik atau angka-angka. Damp-

aknya begitu besar dalam kelangsungan hidup keluarga korban. Kematian satu jiwa akibat kecelakaan tetap ironi dan duka mendalam. Bagaimana masa depan istri dan anak-anak yang ditinggal tulang punggung keluarga karena tewas akibat kecelakaan? Selain itu, korban yang terluka berpotensi mengalami penurunan daya atau kemampuan fisik yang dapat membatasi perkembangan dan aktivitas hidupnya.

Rekayasa lalu lintas yang dilakukan pada masa Angkutan Lebaran meliputi kebijakan ganjil genap, *contra flow* dan *one way* terbukti dapat memperlancar arus lalu lintas baik di jalan tol maupun jalan nasional.

Maka dari itu, perlu dirumuskan strategi besar agar kecelakaan lalu lintas tidak selalu berulang. Jika tanpa upaya strategi pencegahan, masa mudik dan balik lebaran akan terus berhias tragedi kematian masyarakat. Di sinilah pentingnya membangun kesadaran bermobilitas yang mengutamakan keselamatan dan keamanan. Lebaran merupakan momen berkumpul bersama, merayakan kehidupan bukan kematian.

Kecelakaan dalam masa operasi ketupat bukan sekadar membayangi perjalanan mudik dan balik antardaerah oleh masyarakat. Aktivitas warga saat atau selama Lebaran di suatu daerah, apalagi menggunakan sepeda motor, juga berisiko fatal.

Pentingnya masyarakat memahami bahwa sepeda motor bukan kendaraan dengan jaminan tinggi keselamatan. Namun, tipe kenda-

raan seperti inilah yang terjangkau oleh kondisi ekonomi mayoritas warga terutama di daerah. Selain itu, di daerah juga tidak tersentuh atau sedikit dilayani angkutan umum yang memadai dan andal.

Bisa jadi, tingkat kesadaran pengguna jalan semakin meningkat pada saat musim lebaran dan himbauan pentingnya keselamatan berkendara pada musim lebaran tahun ini cukup gencar. Sangat membantu turut menurunkan angka kecelakaan selama musim lebaran 2023.

Mudik gratis perlu ditambah

Penyelenggaraan mudik gratis tahun ini jauh lebih banyak dan lebih beragam asal dan tujuannya. Beragam, artinya tidak hanya moda bus, namun menggunakan moda kereta, kapal laut dan pesawat terbang.

Penyelenggaranya tidak hanya Kementerian/Lembaga, BUMN perusahaan swasta di tingkat pusat, namun cukup banyak pemerintah daerah, BMUD turut serta berpartisipasi. Tahun ini tercatat sejumlah pemda yang menyelenggarakan mudik gratis, seperti Pemprov. Jawa Tengah, Pemprov. DKI Jakarta, Pemprov. Jatim, Pemprov. Kalimantan Barat, Pemprov. Kalimantan Selatan, Pemprov. Sumatera Selatan, Pemkab. Tangerang, Pemkot. Medan. Tahun depan, tradisi mudik gratis ini oleh pemerintah daerah hendaknya dapat diikuti semua pemda yang lain. Tujuannya adalah untuk meminimalkan pemudik memakai sepeda motor. Selain itu pula turut membantu warga yang mau mudik namun kemampuan finansial kurang.

Namun, masih terdapat penyelenggara mudik gratis yang memakai bus pariwisata yang tidak berijin alias tidak terdaftar pada spionam.dephub.go.id. Penyelenggara mudik gratis yang dikelola *event organizer* (EO) tanpa ada pengawasan ketat dan terarah, cenderung tidak memper-



hatikan kondisi kendaraan yang disewanya. Dampaknya, akan rentan untuk menjaga keselamatan bagi penumpang.

Jangan dibiarkan berlarut-larut sejumlah bus wisata yang tidak berijin beroperasi bebas. Setidaknya dapat dilakukan *rampcheck* di lokasi wisata. Jika ditemukan, diminta pihak penyelenggara bertanggungjawab untuk mencari bus pengganti. Orang pintar tentunya tidak mau menggunakan transportasi umum ilegal. Gunakanlah transportasi umum yang legal, lebih aman dan terjamin, akan dapat santunan dari pemerintah melalui PT Jasa Raharja.

Jika memakai transportasi umum ilegal, tidak bisa dipastikan kelainan kendaraannya, pengemudinya dan kalau terjadi musibah kecelakaan sedang diusulkan tidak mendapat santunan dari PT Jasa Raharja. Juga bagi yang tidak memakai helm saat berkendara, tidak memiliki SIM, tidak membayar pajak kendaraan bermotor (PKB), melanggar aturan berlalu lintas



Suasana persiapan pemberangkatan bus program mudik gratis arus balik di Terminal Giwangan Yogyakarta, 28 April 2023. Foto: HMS DJPD/WBW

sedang diusulkan tidak mendapat santunan dari PT Jasa Raharja.

Pemudik bersepeda motor masih cukup banyak melanggar kelebihan muatan maupun penumpang. Pemudik membawa anak-anak masih cukup banyak ditemukan. Tidak hanya satu anak yang dibawa, namun bisa dua belum lagi ditambah beban barang yang sesungguhnya menyulitkan pengemudi mengendalikan sepeda

motornya. Masih ada pemakaian mobil bak terbuka dan angkutan roda 3 yang biasanya angkut barang tapi digunakan angkutan penumpang saat mudik lebaran. Mudik gratis ke Sumatera perlu ditambah seiring dengan terhubung jaringan jalan tol Trans Sumatera, memberikan konsekuensi masyarakat ingin mudik setiap setahun sekali. Misalnya, tujuan ke Provinsi Lampung tidak hanya sebatas



harus segera dibenahi dan dibuat senyaman menggunakan kendaraan pribadi. Transportasi umum belum menjangkau ke kawasan pedesaan. Penggunaan mobil bak terbuka untuk wisata dan mudik lebaran makin marak. Warga tidak ada pilihan menggunakan transportasi umum.

Kecelakaan maut di Aceh selama Lebaran 2023 menelan 12 korban jiwa dan puluhan korban kritis. Penggunaan kendaraan barang untuk mengangkut penumpang menjadi pemicu utama kecelakaan. Pelanggaran berkendara berakibat fatal, kematian sia-sia di jalan raya (Kompas.id, 30 April 2023).

Sudah ada 11 kota (selain Jakarta) yang sudah memiliki layanan transportasi umum dengan skema pembelian layanan (*buy the service/BTS*). Sebanyak 62 persen penumpang BTS memiliki sepeda motor. Penumpang pelajar terbesar menggunakan bus skema BTS, yakni 45 persen. Kemudian 38,5 persen masyarakat umum, 15,5 persen lanjut usia dan 1 persen disabilitas. Porsi anggaran untuk membenahi transportasi umum di daerah harus dilipatgandakan, ketimbang negara terus menerus mempertahankan atau menambah subsidi bahan bakar minyak (BBM) yang menggerogoti keuangan APBN.

Akan banyak diperoleh manfaat jika transportasi umum di daerah dibenahi. Selain untuk kepentingan melayani pemudik saat pulang kampung, juga menghemat subsidi BBM, menurunkan angka kecelakaan, mengurangi kemacetan lalu lintas dan mengendalikan angka inflasi di daerah.

Djoko Setijowarno, Akademisi Prodi Teknik Sipil Unika Soegijapranata dan Wakil Ketua Bidang Pemberdayaan dan Penguatan Wilayah MTI Pusat



Posko Angkutan Lebaran Terpadu Tahun 2023 di Kantor Pusat Kemenhub, Jakarta.

Kota Bandar Lampung, namun dapat menjangkau layanan hingga ke semua ibukota kabupaten dan kota yang ada.

Pelanggaran kendaraan barang

Pelanggaran penggunaan kendaraan barang dan jenis muatan selama musim lebaran 2023 masih terjadi. Informasi jadwal kendaraan barang dan jenis muatan yang boleh diangkut, hendaknya diberikan sebulan sebelum pelaksanaan untuk batas muatan. Supaya pemilik barang dan perusahaan angkutan dapat mempersiapkan dan merencanakan lebih matang lagi.

Hampir 100 persen kendaraan barang kelebihan dimensi dan muatan (*over dimension dan over load*) yang melintas melewati Pelabuhan Ciwandan menuju Pulau Sumatera. Pula, jenis komoditas yang diangkut tidak sesuai Surat Keputusan Bersama Direktur Jenderal Perhubungan Darat, Kepala Korps Lalu Lintas Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Direktur Jenderal Bina Marga Nomor KP-DRJD 2616 Tahun 2023 Nomor SKB/48/IV/2023 Nomor 05/PKS/Db/2023 tentang Pengaturan Lalu Lintas Jalan serta Penyeberangan Selama Masa Arus Mudik dan Arus Balik Angkutan Lebaran Tahun 2023/1444 Hijriah,

Keselamatan transportasi air

Sama halnya di jalan raya, setiap musim lebaran ada kecelakaan di perairan. Insiden dengan *speedboat* Evelin Calisca 01 terbalik di perairan Indragiri Hilir, Riau. Musibah terjadi ketika kapal sedang mengangkut penumpang menuju Tanjung Pinang (Pulau Bintan), Kepulauan Riau (Kamis, 27/04/2023). Menurut keterangan awak kapal yang selamat, kecelakaan itu bermula saat nakhoda berusaha menghindari balok kayu di tengah perjalanan. Namun, karena saat itu *speedboat* tengah melaju kencang, kapal tersebut oleng, lalu terbalik (Kompas.id, 29/04/2023).

Penggunaan jaket pelampung (*life jacket*) belum memasyarakat, pelabuhan tidak resmi harus ditertibkan, pembuatan kapal perlu distandarkan dan pengawasan pada saat perijinan, SDM nakhoda *speedboat* masih turun temurun dengan pengetahuan yang minim dan keahliannya perlu ditingkatkan, dan instansi yang harus mengawasi memberikan sanksi jika ada pelanggaran selama proses pelayaran tidak jelas.

Program nasional transportasi umum

Ke depan dalam jangka pendek, transportasi umum di daerah

DUKUNGAN DITJEN HUBDAT PADA KTT ASEAN KE-42



Sesuai arahan Menteri Perhubungan, Ditjen Perhubungan Darat memberikan dukungan yang maksimal demi kelancaran KTT Asean. Dengan pelayanan transportasi yang baik, diharapkan dapat meninggalkan kesan yang baik di mata para pemimpin negara dan para delegasi KTT ASEAN yang hadir di Labuan Bajo.

Dalam rangka menyukseskan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ASEAN ke-42 di Labuan Bajo, Direktorat Jenderal Perhubungan Darat (Ditjen Hubdat) memberikan sejumlah dukungannya kelancaran berupa sarana dan prasarana. Dan yang mengembirakan hal tersebut mendapatkan apresiasi dari sejumlah pihak.

Dijelaskan oleh Direktur Jenderal Perhubungan Darat, Hendro Sugiarno sesuai arahan dari Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi bahwa subsektor yang ada di bawah Kementerian Perhubungan (Kemhub)

diharapkan dapat secara maksimal mendukung kelancaran KTT ASEAN tersebut. Karena dengan pelayanan transportasi yang baik, diharapkan dapat meninggalkan kesan yang baik pula di mata para pemimpin negara dan para anggota delegasi KTT ASEAN yang hadir di Labuan Bajo.

“Dan alhamdulillah acara KTT ASEAN ini berjalan lancar dan sukses, selain itu layanan kami dalam rangka mendukung kelancaran acara ini juga mendapat apresiasi dari sejumlah pihak. Diantara para delegasi, tim pendukung dan para media dari perwakilan negara Asean yang menggunakan jasa bus *shuttle* berserta awak pengemudinya yang mengantarkan para peserta konferensi ini,” kata Hendro.

Dirinya juga berharap dengan kesan baik yang diberikan pihaknya terhadap para delegasi yang menggunakan jasanya

memperkenalkan Labuan Bajo kepada masyarakat dunia.

Hendro juga mengatakan bahwa pada KTT Asean di Labuan Bajo pihaknya menyediakan 25 unit mini bus (Hiace) berkelas premium yang juga membantu memperlancar mobilitas para tim delegasi, tim pendukung dan juga awak media. Mini Bus *Shuttle* ini telah beroperasi sejak 6 hingga 12 Mei 2023, mulai pukul 06.00 WITA hingga 20.00 WITA, untuk mendukung mobilitas para delegasi, tim pendukung dan awak media.

“Kendaraan ini secara terjadwal berkeliling ke bandara dan lokasi-lokasi penyelenggaraan KTT ASEAN serta hotel tempat menginap para delegasi dengan waktu kedatangan 10-15 menit sekali. Minibus ini membuat lalu lintas di Labuan Bajo menjadi lebih efisien,” katanya.

Tidak hanya itu, kata Hendro, guna mengatur kondisi lalu lintas agar tidak terjadi kemacetan selama penyelenggaraan kegiatan, telah diatur rekayasa lalu lintas seperti sistem satu arah, pengaturan parkir *on street*, dan pengalihan sementara bongkar muat kendaraan angkutan barang dari pelabuhan Penyeberangan Labuan Bajo ke Pelabuhan *multi purpose* Wae Kelambu selama pelaksanaan KTT ASEAN.

“Kemudian kami juga akan menghentikan sementara operasional di Pelabuhan Labuan Bajo mulai tanggal 6 sampai 11 Mei 2023 dan akan dialihkan ke Wae Kelambu agar tidak menghambat kegiatan KTT ASEAN. Pelayanan akan dialihkan ke rute Badas-Wae Kelambu dengan KM. Swarna Bahtera,” jelasnya.

Hendro juga menjelaskan bahwa Ditjen Hubdat telah melakukan relokasi pemasangan Alat Penerangan Jalan (APJ) sebanyak 45 unit dengan rincian: Jalan



Sejumlah dukungan Ditjen Perhubungan Darat pada penyelenggaraan KTT Asean ke 42 di Labuan Bajo antara lain berupa:

1. Unit kendaraan *shuttle bus* untuk memobilisasi peserta KTT ASEAN
2. Alat Penerangan Jalan Umum
3. Halte bus
4. *Water barrier*

“Kami juga telah membangun 3 Halte yang berada di Bandara, Halte Kampung Ujung, dan Halte Simpang Pede. Sementara pemasangan fasilitas keselamatan jalan telah kami siapkan rambu lalu lintas, RPPJ, Paku Jalan, alat penerangan jalan (APJ), Delineator, dan *Guardrail* Marka. Semoga dengan dukungan ini dapat membantu kegiatan KTT ASEAN berjalan dengan lancar dan juga mempermudah mobilitas peserta selama acara berlangsung,” tutupnya. (*)

Bandara sejumlah 23 unit APJ dan jalan Mgr. Van Beakum 22 unit APJ. Kemudian pengadaan *water barrier* sebanyak 200 buah dan *traffic cone* sebanyak 100 buah yang akan diserahkan ke Dinas Perhubungan Provinsi NTT untuk mendukung pelaksanaan penerapan rekayasa lalu lintas.

Perum PPD resmi bergabung dengan Perum Damri melalui penandatanganan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2023 tanggal 6 Juni 2023 tentang Penggabungan Perum PPD ke Dalam Perum Damri oleh Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo.

Dengan adanya penggabungan tersebut maka Perum Damri resmi menjadi satu-satunya Perusahaan Umum Berbasis Jalan Milik Negara. Rencana penggabungan ini diprakarsai oleh Menteri BUMN Erick Thohir guna penguatan kinerja perusahaan sehingga memperkuat daya jangkau dan memperluas jaringan dalam meningkatkan konektivitas transportasi nasional.

Wakil Menteri BUMN II Kartika Wirjoatmodjo menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang terlibat dalam penggabungan tersebut. Pencapaian ini menjadi salah satu milestone penting dalam dan bersejarah bagi pengelolaan BUMN transportasi jalan.

“Penggabungan ini merupakan inisiatif Kementerian BUMN sebagai upaya penguatan untuk meningkatkan aksesibilitas terhadap mobilitas masyarakat dan konektivitas

MERGER PPD - DAMRI, TINGKATKAN KONEKTIVITAS TRANSPORTASI

Dengan bergabungnya Perum PPD ke dalam Perum DAMRI, maka tujuan besar Pemerintah untuk dapat meningkatkan konektivitas antar wilayah dapat terwujud khususnya untuk mendukung pertumbuhan dan pemerataan ekonomi nasional.

nasional yang sekaligus menciptakan nilai tambah (*value creation*) dan *sustainability* bagi perusahaan BUMN. Inisiatif ini memiliki tujuan untuk memperkuat daya jangkau dan memperluas jaringan bisnis agar tidak terjadi tumpang tindih akibat memiliki fokus bisnis yang sama antar kedua entitas,” ucap Tiko dalam sambutannya di acara Perayaan Penggabungan Perum

PPD ke dalam Perum DAMRI yang berlangsung di Jakarta, Senin (19/6).

Tiko berharap, setelah penggabungan ini Perum DAMRI dapat bekerja secara lebih efisien dan produktif, baik dalam menjalankan bisnisnya secara komersial, maupun dalam melaksanakan fungsinya sebagai perpanjangan tangan Pemerintah

dalam memberikan layanan mobilitas masyarakat di daerah 3 TP (Tertinggal, Terpencil, Terluar dan Perbatasan). Hal tersebut tentunya untuk menjaga *milestone* pencapaian *value creation* yang telah menjadi target pasca-penggabungan ini.

“Perum DAMRI diharapkan melakukan kerjasama dan meningkatkan integrasi multimoda dengan perusahaan moda transportasi lain, sehingga dapat menjadi akselerator *feeding system* pada moda transportasi lain seperti Bus, Kereta Api, Kereta Cepat, MRT, LRT, dan bahkan Pesawat Udara. Selain itu, sebagai national flag carrier dalam industri transportasi umum berbasis jalan, Perum Damri juga diharapkan mampu mendorong pemerataan pertumbuhan ekonomi masyarakat melalui pelayanan

berkualitas yang dapat menciptakan *multiplier effect* di seluruh Indonesia,” ujar Tiko.

Direktur Utama Perum DAMRI Setia N. Milatia Moemin menyampaikan, dengan

Merger PPD - DAMRI memberikan optimisme kepada masyarakat Indonesia, bahwa transportasi nasional akan terus tumbuh dan pada akhirnya dapat bersaing di pasar domestik dan global.

bergabungnya Perum PPD ke dalam Perum DAMRI, maka tujuan besar Pemerintah untuk dapat meningkatkan konektivitas nasional dapat terwujud khususnya untuk mendukung pertumbuhan dan pemerataan ekonomi nasional, meningkatkan dan mengembangkan kapasitas penyelenggara jasa transportasi jalan yang berkelanjutan, serta menyediakan layanan transportasi yang terstandarisasi guna meningkatkan

kepuasan bagi pelanggan. “Terwujudnya penggabungan PPD-DAMRI berdasarkan PP Nomor 30 ini semoga dapat memberikan manfaat yang besar bagi perekonomian di Tanah Air. Serta memberikan optimisme kepada masyarakat Indonesia, bahwa transportasi nasional akan terus tumbuh dan pada akhirnya dapat bersaing di pasar domestik dan global. Kami memohon dukungan dan kerja sama agar DAMRI dapat mewujudkan visinya Menjadi Perusahaan transportasi jalan kelas dunia yang berkinerja unggul dan berkelanjutan dengan memberikan pelayanan yang berkualitas bagi pelanggan untuk mendukung konektivitas nasional,” ujar Setia. (*)



Bus PPD dan bus Damri di Bandara Soekarno Hatta, Tangerang, Banten.



kepuasan bagi pelanggan.





Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan terus mendorong percepatan pengelolaan angkutan massal berbasis jalan dengan skema *Buy The Service* atau yang kerap disebut BTS. Oleh karena itu, Ditjen Hubdat menggelar kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) Angkutan Perkotaan di Swiss-Belhotel Batam, Kepulauan Riau pada Selasa (30/05).

Direktur Jenderal Perhubungan Darat, Hendro Sugiatno dalam pengarahannya menyatakan bahwa, "Konsep BTS ini merupakan konsep yang baik mengenai bagaimana kita bisa membangun transportasi di perkotaan agar dapat tumbuh dengan baik."

Menurutnya sesuai amanat yang tertuang dalam Undang-Undang 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Pemerintah terus berupaya untuk memperbaiki pelayanan transportasi publik di perkotaan.

"Ini kewajiban kita untuk terus membangun transportasi publik yang aman, nyaman, dan juga baik. Kita juga harus memenuhi tuntutan masyarakat mengenai ketepatan waktu dalam bertransportasi," lanjutnya.



Dirjen Perhubungan Darat Hendro Sugiatno memberikan pengarahannya pada Bimtek Angkutan Perkotaan di Batam, 30/5/2023. Foto: HMS/CAS

PERCEPATAN PENGELOLAAN ANGKUTAN MASSAL BERBASIS JALAN

Ini kewajiban kita untuk terus membangun transportasi publik yang aman, nyaman, dan juga baik. Kita juga harus memenuhi tuntutan masyarakat mengenai ketepatan waktu dalam bertransportasi.

Dirjen Hendro juga berharap ke depannya dari 10 kota yang sudah ada program BTS yaitu Medan, Denpasar, Palembang, Solo, Yogyakarta, Makassar, Banjarmasin, Banyumas, Surabaya, dan Bandung dapat mengembangkan transportasi perkotaan tanpa menunggu subsidi dari Pemerintah.

"Saat ini sudah ada beberapa kota yang peduli transportasi publik. Batam mudah-mudahan cukup baik karena Batam akan berdampingan dengan Singapura. Bagi rekan-rekan yang memiliki usaha di bidang transportasi publik ini ada peluang yang sudah dibuka oleh Bapak Walikota Batam yang akan membangun transportasi publik di Batam. Kita lebih mendorong peran swasta dalam membangun transportasi publik yang lebih baik. Pemerintah hanya mengatur dari sisi regulasinya saja sehingga transportasi publik itu dapat tumbuh dan berkembang di perkotaan dengan lebih baik," kata Dirjen Hendro.

Dirjen Hendro turut mengajak seluruh pihak baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah untuk bersama-sama menyadari bahwa peran transportasi penting sebagai katalisator dalam pendukung pertumbuhan ekonomi suatu wilayah.



Sejumlah pelajar hendak menaiki bus Trans Banyumas. Saat ini Trans Banyumas memiliki 3 koridor. Koridor 1: T.Ajibarang-Pasar Pon; Koridor 2: T.Notog-T.Bawah Baturraden; Koridor 3: T.Bulupitu-T. Kebondalem.

"Pemerintah ini ada pemerintah pusat maupun daerah, bagaimana penyelenggaraannya apakah dengan APBD atau mendorong peran swasta. Tapi lebih bagus jika mendorong peran swasta dalam menyelenggarakan transportasi yang lebih baik di daerah," ujar Dirjen Hendro lebih lanjut.

Pada bimtek ini, ada beberapa isu, yang relevan untuk disampaikan dan didiskusikan, antara lain: a. Keterpaduan perencanaan transportasi dan wilayah; b. Integrasi Pelayanan Transportasi; c. Pendanaan; d. Peningkatan peran swasta dan masyarakat; e. Kelembagaan; f. Pengembangan teknologi dan SDM; g. Lingkungan.

Direktur Angkutan Jalan, Suharto dalam laporannya pada Bimtek ini menjelaskan bahwa kegiatan ini dihadiri oleh 100 peserta yang terdiri dari unsur Pemerintah Daerah yang terdiri dari Kepala Bappeda dan Kepala Dinas Perhubungan Provinsi/Kota/Kabupaten Program Pengembangan Sistem Angkutan Umum Massal



Direktur Angkutan Jalan, Suharto, ketika menyampaikan paparan pada Bimtek Angkutan Perkotaan di Batam, 30/5/2023. Foto: HMS/WBW

di Kawasan Perkotaan di Indonesia serta Program *Buy The Service* (BTS) serta para pemangku kepentingan lainnya termasuk operator.

"Bimtek ini bertujuan dan berfokus untuk mensosialisasikan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pemberian Subsidi Angkutan Penumpang Umum Perkotaan. Selain itu juga memberikan informasi serta pelatihan

dalam rangka persiapan penyerahan pengelolaan Program BTS ke daerah dan melakukan identifikasi kebutuhan sumber daya manusia serta penganggaran, dalam pengelolaan program BTS oleh daerah. Selain itu kami berharap juga melalui bimtek ini dapat mempersiapkan antisipasi dalam rencana pengelolaan program BTS oleh daerah serta kami juga merencanakan akan melakukan benchmarking operasional dan pengelolaan angkutan perkotaan di Singapura yang bekerjasama dengan MOT dan LTA Singapura," pungkas Suharto.

Adapun pembicara yang hadir dalam 2 sesi pada Bimtek Angkutan Perkotaan ini yaitu Dr. Okto Manullang selaku akademisi,

Djoko Setijowarno sebagai moderator sekaligus akademisi, perwakilan dari Bappenas, Kemendagri, Bappeda DKI Jakarta, PT. Transjakarta, ITDP, GIZ, PT. Surveyor Indonesia, PT. TKDN, dan PT. AINO Indonesia. Selain itu ada juga sharing session dari Kepala Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh dan Kota Semarang terkait pengembangan BRT. (*)

Upaya dan Tindak Lanjut

- 1. Pemilihan trayek/rute**, harus didasarkan pada jumlah penumpang/demand dan kesiapan operator eksisting yang akan diikutsertakan. Program BTS harus sejalan dengan master plan perencanaan dan pengembangan angkutan umum di daerah.
- 2. Kolaborasi dan sinergitas dengan operator lokal.** Operator angkutan umum eksisting harus dilibatkan dalam sistem BTS, karena mereka bukan pesaing namun sebagai mitra.
- 3. Koordinasi antar pemangku kepentingan di daerah** (DPRD, Bappeda, PU, Disdik, Kepolisian, Organda, operator eksisting, swasta dan media) untuk memastikan keberlangsungan program BTS khususnya dalam penerapan kebijakan push & pull dan penyediaan infrastruktur pendukung BTS.
- 4. Komitmen, kesiapan finansial, dan kesiapan kelembagaan pemerintah daerah.** Pemerintah daerah perlu menyiapkan tahapan pelaksanaan dan skema pendanaan program BTS, serta bantuan teknis terkait pengembangan transportasi publik perkotaan.
- 5. Perbaikan standar pelayanan minimal (SPM) BTS** untuk memastikan tercapainya peningkatan kualitas layanan. Selain itu, operator juga mampu melakukan perbaikan kinerja operasional dan layanan secara proporsional.
- 6. Monitoring, pengawasan dan evaluasi berkelanjutan** diperlukan untuk meningkatkan layanan dan untuk menilai efisiensi layanan. Termasuk perbaikan operasional dan teknologi IT yang digunakan untuk sistem BTS.

Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan, Hendro Sugiarno memberikan arahan kepada mitra ojek online dalam aspek keselamatan khususnya dalam memberikan pelayanan kepada penumpang dalam kegiatan Apel Keselamatan Berkendara yang berlangsung di Lapangan Bola Aldiron, Gatot Subroto, Jakarta Selatan pada Selasa (23/05).

“Dalam menjalankan tugasnya, mitra pengemudi ojek online wajib menjadi keselamatan sebagai yang utama dan harus diprioritaskan. Saya berterimakasih kepada seluruh manajemen dan tim Gojek yang telah membuat acara apel ini, akan ada apel lain di beberapa wilayah khususnya dalam membahas arti penting keselamatan,” kata Dirjen Hendro saat memberikan pengarahan. Dirjen Hendro menyatakan bahwa pekerjaan yang dilakukan setiap pengemudi ojek online

Dirjen Perhubungan Darat Hendro Sugiarno bersama Dir Regident Korlantas Polri Brigjen Pol Drs. Yusri Yunus dan para driver mitra ojek online pada kegiatan Apel Keselamatan Berkendara di Lapangan Aldiron, Jakarta, 23/5/2023. Foto: HMS DJPD/MAD

DIRJEN HUBDAT TEKANKAN KESELAMATAN BAGI MITRA OJEK ONLINE

Keselamatan ditunjang dengan melakukan pengecekan secara berkala kendaraan yang digunakan. Pastikan juga untuk selalu menaati peraturan lalu lintas yang ada. Ingat, keluarga menunggu di rumah.

penuh risiko sehingga perlu meningkatkan kewaspadaan dan kehati-hatian saat berkendara di jalanan. Dirjen Hendro juga menjelaskan sepeda motor harus diperhatikan dengan baik.

“Kepada rekan-rekan mitra pengemudi, saya mengingatkan bahwa pekerjaannya memiliki risiko yang sangat tinggi setiap hari dengan bekerja di jalan. Saya mendapatkan data dari Korlantas Polri bahwa kecelakaan yang

paling tinggi adalah pengendara sepeda motor,” demikian dijelaskan Dirjen Hendro.

Dalam kesempatan tersebut, Dirjen Hendro mengapresiasi Gojek yang telah membuat aplikasi pengingat waktu istirahat untuk mitra pengemudi.

Sesuai Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 12 Tahun 2019 ada sejumlah ketentuan yang harus dipenuhi pengemudi saat berkendara yaitu:

- Menggunakan jaket dengan bahan yang memantulkan cahaya dengan identitas pengemudi;
- Menggunakan celana panjang;
- Menggunakan sepatu;
- Menggunakan sarung tangan; dan
- Membawa jas hujan.

“Keselamatan ditunjang dengan melakukan pengecekan secara berkala kendaraan yang digunakan. Pastikan juga untuk selalu menaati peraturan lalu lintas yang ada dan jangan lupa agar melakukan pengecekan pada masing-masing individu agar tidak memaksakan keadaan



Dirjen Perhubungan Darat Hendro Sugiarno, bersama Direktur Angkutan Jalan Suharto, Dir Regident Korlantas Polri Brigjen Pol Drs. Yusri Yunus, Ketua Komisi V DPR RI Lasarus, Presiden Unit Bisnis On-Demand Services GoTo Catherine Hindra, dan Chief of PPGR GoTo/Head of PPGR Gojek Shinto Nugroho pada kegiatan Apel Keselamatan Berkendara di Lapangan Aldiron, Jakarta, 23/5/2023. Foto: HMS DJPD/MAD

saat melakukan pekerjaan ini. Perlu diingat bahwa keluarga kita menunggu di rumah masing-masing,” jelas Dirjen Hendro.

Melalui kegiatan hari ini diharapkan dapat terjadi sinergi bersama baik antara Pemerintah selaku regulator maupun aplikator maka diharapkan seluruh pemangku kepentingan dapat selalu memperhatikan aspek keselamatan khususnya dalam memberikan pelayanan kepada penumpang.

Dalam kegiatan apel tersebut Gojek dan Korlantas Polri juga

berencana untuk memperkuat kolaborasi bersama untuk meningkatkan keselamatan mitra pengemudi dan penumpang. Selain itu mitra pengemudi mendapatkan program pelatihan berkendara yang berkeselamatan dalam mendukung meringankan beban mitra pengemudi dan keluarganya melalui berbagai kemudahan akses promo dan layanan dengan harga spesial.

“Saya mengapresiasi dan memberikan dukungan atas inisiatif manajemen dan mitra pengemudi Gojek yang memiliki berbagai manfaat bagi mitranya, salah satunya adalah program pelatihan berkendara dan program swadaya. Akhir kata, jaga solidaritas positif, keamanan berkendara dan selalu berempati antar sesama sebagai misi utama komunitas mitra pengemudi. Saya mengucapkan terima kasih atas kerjasamanya dari seluruh pihak. Dan sekali lagi, saya mengharapkan kita semua dapat membuka pikiran demi kemajuan untuk kebaikan bangsa Indonesia,” pungkas Dirjen Hendro.

Dalam acara ini dihadiri juga oleh Ketua Komisi V DPR RI Lasarus, Direktur Angkutan Jalan Suharto, Dir Regident Korlantas Polri Brigjen Pol Drs. Yusri Yunus, Presiden Unit Bisnis On-Demand Services GoTo Catherine Hindra, dan Chief of PPGR GoTo/Head of PPGR Gojek Shinto Nugroho. (*)



Dirjen Perhubungan Darat Hendro Sugiarno menyematkan pin keselamatan kepada perwakilan mitra ojek online pada kegiatan Apel Keselamatan Berkendara di Lapangan Aldiron, Jakarta, 23/5/2023. Foto: HMS DJPD/MAD

E-SRUT RANCANG BANGUN KENDARAAN BERMOTOR

Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan melakukan sebuah terobosan dalam meningkatkan pelayanan di bidang Rancang Bangun Kendaraan Bermotor yaitu dengan implementasi Elektronik Sertifikat Registrasi Uji Tipe (e-SRUT). Berkaitan dengan hal tersebut, Ditjen Hubdat menggelar kegiatan sosialisasi penerapan penerbitan Elektronik Sertifikat Registrasi Uji Tipe (e-SRUT) Rancang Bangun Kendaraan Bermotor di Hotel The Westin Surabaya pada Senin (26/06). Pemberlakuan e-SRUT ini akan dimulai per tanggal 1 Juli 2023 dan hanya dapat diakses melalui website www.ujitiperb.dephub.go.id.

“Pada masa kini di era yang serba digital Pemerintah terus bertransformasi sesuai amanat Presiden dalam Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 Tentang Satu Data Indonesia dan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 Tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. Perkembangan masyarakat digital yang serba cepat memerlukan suatu upaya sistematis dan strategis dalam penanganannya,” kata Kasubdit Uji Tipe Kendaraan Bermotor, Dewanto Purnacandra.

Menurut Dewanto, latar belakang e-SRUT adalah untuk meningkatkan efektivitas dan efisien pada proses simpul input dan output yang menekankan pada aspek keamanan. “Selain itu juga dapat meningkatkan efisiensi dalam

Sertifikat elektronik memberikan jaminan otentikasi data, jaminan keutuhan data, dan anti penyangkalan karena dapat langsung dibuktikan waktu penandatanganan serta dapat menyangkal pemalsuan dari suatu keutuhan data.

proses penerbitan, pengiriman hingga diterima oleh perusahaan karoseri kendaraan bermotor,” ujar Dewanto.

Sertifikat elektronik memberikan jaminan otentikasi data, jaminan keutuhan data, dan anti penyangkalan karena dapat langsung dibuktikan waktu penandatanganan serta dapat menyangkal pemalsuan dari suatu keutuhan data.

“Melalui kegiatan ini saya berharap akan dapat meningkatkan pemahaman bersama dan kolabo-

rasi antara Pemerintah, Perusahaan Karoseri dan Masyarakat dalam penyelenggaraan e-SRUT,” pungkias Dewanto.

Kegiatan sosialisasi penerapan penerbitan e-SRUT Rancang Bangun Kendaraan Bermotor dihadiri secara fisik oleh 50 Perusahaan Karoseri, para perwakilan dari Dinas Kabupaten/Kota/Provinsi seluruh Indonesia dan para perwakilan seluruh BPTD hadir melalui virtual *zoom meeting*.(*)



Kasubdit Uji Tipe Kendaraan Bermotor Dewanto Purnacandra bersama pejabat terkait meresmikan pemberlakuan e-SRUT Rancang Bangun Kendaraan Bermotor, Surabaya, 26/6/2023. Foto: HMS DJPD/MAD

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengapresiasi inisiatif yang dilakukan oleh pelaku usaha kecil menengah (UKM), salah satunya PT. Roda Elektrik Asia (Elders Garage) yang mampu menjadi pelopor untuk membuat skuter listrik hasil konversi.

Apresiasi Menhub ditunjukkan dengan menandatangani secara langsung skuter hasil konversi dari Elders Garage, salah satu pengelola bengkel konversi sepeda motor konvensional ke sepeda motor listrik yang sudah tersertifikasi. Skuter listrik *limited edition* ini merupakan hasil kolaborasi antara Elders Garage dengan Motolino, *dealer* Vespa terbesar yang ada di Swiss.

Skuter listrik yang ditandatangani oleh sejumlah Menteri ini nantinya akan dibawa ke acara *Vespa World Day 2023*. Sebuah pertemuan tahunan klub vespa dunia yang akan berlangsung di Interlaken, Swiss pada 15-18 Juni 2023 mendatang. Dimana sekitar 4.000 hingga 6.000 penggemar Vespa dari berbagai belahan dunia akan berkumpul dan melakukan *touring* bersama.

Sebelum tiba di kantor Kemenhub, Tim Elders bersama dengan perwakilan Vespa Club Indonesia, dan musisi Kaka Slank, melakukan konvoi menggunakan skuter listrik menuju kantor Kemenhub.

“Kreativitas dari para pelaku UKM yang ada di Indonesia, seperti Elders Garage ini luar biasa. Apabila ini menjadi satu keahlian maka nilai tambah yang diperoleh itu luar biasa tinggi sekali. Saya pikir produknya untuk dijual di Indonesia saja, ternyata juga ekspansi untuk ekspor ke Eropa. Jadi patut kita dukung penuh,” ujar Menhub.

Menhub berpesan kepada para pelaku UKM yang bergerak di bidang otomotif untuk mencontoh apa yang dilakukan oleh Elders



Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi didampingi Sesjen Kemenhub Novi Rianto, Dirjen Perhubungan Darat Hendro Sugiatno usai menandatangani skuter listrik limited edition, hasil kolaborasi Elders Garage dengan dealer vespa Motolino Swiss, Kantor Kemenhub Jakarta, 5/6/2023. Foto: HMS DJPD/BYU

MENHUB APRESIASI SKUTER LISTRIK HASIL KONVERSI KARYA ANAK BANGSA

Garage, yaitu dengan menggandeng pelaku industri yang lebih besar agar bisa memproduksi dalam jumlah yang lebih banyak. “Kalau produk ini bisa dibuat massal, maka akan lebih ekonomis harganya,” ucap Menhub.

Menhub berharap Elders Garage dapat menularkan semangat kepada anak-anak muda pelaku usaha di bidang otomotif lainnya, untuk berani mengeluarkan ide kreatifnya di bidang kendaraan ramah lingkungan menuju pasar global.

Lebih lanjut Menhub terus mendorong sinergi dan kolaborasi yang baik antara Pemerintah, pelaku industri otomotif dan masyarakat, dalam upaya membentuk ekosistem kendaraan listrik di Indonesia.

Sebagai informasi, Skuter listrik hasil konversi ini telah diuji di Balai Pengujian Laik Jalan dan Sertifikasi Kendaraan Bermotor (BPLJSKB), dengan spesifikasi kendaraan berkapasitas mesin 110cc, dengan daya baterai mencapai 3000 watt. Pengujiannya meliputi pemeriksaan kelaikan sistem penggerak motor listrik dan pengujian tipe

fisik kendaraan bermotor listrik. Sebagai pelopor produsen motor listrik hasil konversi, Elders Garage terkenal dengan salah satu model konversi Vespa klasik yang dinamai *Elettrico*.

Program konversi kendaraan listrik baik motor maupun mobil dan jenis kendaraan lainnya, merupakan salah satu program pemerintah untuk mendorong percepatan penggunaan kendaraan listrik di Indonesia.

Kemenhub telah mengeluarkan sejumlah regulasi, salah satunya yaitu Permenhub No. 65 Tahun 2020 tentang Konversi Sepeda Motor Dengan Penggerak Motor Bakar Menjadi Sepeda Motor Listrik Berbasis Baterai, dimana diatur sejumlah syarat dan kriteria untuk dapat ditetapkan sebagai bengkel konversi resmi.

Tercatat jumlah sepeda motor hasil konversi berdasarkan jumlah Sertifikat Uji Tipe dan Sertifikat Registrasi Uji Tipe yang terbit per 12 Mei 2023 yaitu 178 unit. Hingga saat ini terdapat 24 bengkel konversi sepeda motor yang telah tersertifikasi dan 10 bengkel konversi selain sepeda motor. (*)

UPAYA ELEKTRIFIKASI ANGKUTAN UMUM

Melalui Perpres 55 Tahun 2019 yang membahas bagaimana nantinya kita menggunakan kendaraan ramah lingkungan yang berbasis elektrifikasi sehingga Kemenhub selalu mendukung dan mendorong penggunaan kendaraan listrik.

Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan mendorong penggunaan kendaraan listrik sebagai angkutan umum terlebih setelah pandemi mulai berangsur pulih, industri kendaraan listrik dinilai bertumbuh cukup pesat terutama karena didorong oleh insentif dari pemerintah.

Hal ini diungkapkan oleh Direktur Angkutan Jalan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat, Suharto pada pembukaan *ASEAN's International Trade Fair for Automotive, Electric Vehicle, Logistics & Mining Solutions* yang digelar di JIEXPO Kemayoran Jakarta pada Rabu (24/05) hingga Jumat (26/05).

“Setelah pandemi, hari ini kita bersama dapat menikmati kemajuan teknologi di sektor transportasi. Yang sangat berkaitan dengan kami (Kemenhub) yaitu otomotif dan *electric vehicle*. Dinamika otomotif luar biasa dan saat ini regulasi (kendaraan listrik) sudah ada melalui Perpres 55 Tahun 2019 membahas bagaimana nantinya kita menggunakan kendaraan ramah lingkungan yang berbasis elektrifikasi sehingga Kemenhub selalu mendukung dan mendorong penggunaan kendaraan listrik. Saat ini kami telah mempunyai *road map* di mana pada tahun 2030 angkutan umum di beberapa kota khususnya yang dilaksanakan dengan skema *Buy The Service* akan ditetapkan sebagai *pilot project* yang harus menggunakan angkutan umum berbasis elektrik,” kata Suharto.

Setelah penggunaan kendaraan listrik pada kota-kota



percontohan program *Buy The Service*, maka selanjutnya pada tahun 2045 seluruh angkutan umum di Indonesia akan menggunakan kendaraan listrik.

Transportasi Logistik

“Tidak hanya terkait kendaraan listrik, saat ini kendaraan logistik juga masih menjadi tugas dan PR kami. Yang saat ini kita dorong adalah bagaimana menjadi satu kesatuan sistem logistik, satu sistem tiket, juga satu sistem administrasinya,” jelas Suharto.

Saat ini sebagian komponen biaya logistik berasal dari sektor transportasi, sehingga jika terjadi hambatan dalam transportasi maka dapat menyebabkan kenaikan biaya logistik.

Transportasi angkutan barang dengan menggunakan moda angkutan jalan masih menjadi yang paling dominan dalam sistem logistik di Indonesia, untuk itu dibutuhkan suatu strategi kebijakan multimoda dan alihmoda sebagai langkah untuk memperbaiki tata kelola logistik dan implementasi rantai pasok yang efektif dan efisien serta terintegrasi.

“Kami mohon dukungan dan masukan dari asosiasi terhadap beberapa kebijakan barangkali ada beberapa yang dirasa kurang tepat supaya kami dapat melakukan penyesuaian dan menumbuhkan iklim yang lebih kondusif terkait logistik,” ucapnya.

Penyelenggaraan angkutan multimoda bertujuan untuk mewujudkan pelayanan *one stop service* pada angkutan barang, dengan indikator *single seamless services* (S3) yaitu *single operator*, *single tarif*, dan *single document* untuk angkutan barang.

Hal ini selaras dengan upaya pemerintah dalam menata sistem logistik melalui penerapan National Logistics Ecosystem



Direktur Angkutan Jalan Suharto memberikan sambutan pada pembukaan ASEAN's International Trade Fair for Automotive, Electric Vehicle, Logistics & Mining Solutions yang digelar di JIEXPO Kemayoran Jakarta, 24/5/2023.

(NLE) yang mengintegrasikan arus lalu lintas barang (*flow of goods*) dengan dokumen internasional dalam sebuah platform digital layanan logistik dari hulu (kedatangan kapal/pesawat) hingga hilir (pergudangan) dengan kolaborasi antara kementerian/lembaga dan para pelaku logistik.

Guna mendukung peningkatan iklim investasi di bidang transportasi dan logistik, maka

Pemerintah terus berupaya untuk mempermudah proses perizinan berusaha dan kepastian hukum bagi pelaku usaha transportasi dan logistik.

Suharto menjelaskan juga bahwa perlu adanya kolaborasi secara sinergis antara pemerintah bersama pelaku usaha jasa transportasi dan logistik dan pengguna jasa logistik sebagai upaya memperbaiki sistem logistik di Indonesia. (*)



Kementerian Perhubungan resmi memulai pembangunan Terminal Penumpang Tipe A Purworejo Baru. Ditandai dengan dilakukannya peletakan batu pertama atau *ground breaking* pekerjaan konstruksi, yang dihadiri oleh Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi bersama Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, Minggu (21/5), di Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah.

Pembangunan terminal ini merupakan bagian dari program Revitalisasi Terminal Tipe A secara nasional yang dilakukan Kemenhub melalui Ditjen Perhubungan Darat. Revitalisasi dilakukan agar fasilitas dan layanan terminal semakin baik, sehingga dapat menumbuhkan budaya masyarakat untuk menggunakan angkutan massal bus.

Menhub mengatakan sesuai arahan Presiden RI Joko Widodo, pemerintah terus berupaya meningkatkan penggunaan transportasi massal. "Oleh karenanya, pembangunan terminal bus seperti di Solo, Salatiga, Demak, Purwokerto, dan sekarang di Purworejo juga sekaligus menambah fungsi terminal sebagai pusat kegiatan masyarakat dan fungsi ini bisa berkelanjutan," jelas Menhub.

Dengan mengusung konsep *mix use*, terminal ini memiliki tiga fungsi utama, yaitu tidak hanya sebagai tempat naik turun penumpang bus, tetapi juga sebagai pendorong dan penggerak perekonomian wilayah dan sebagai pusat kegiatan sosial, seni dan budaya. Melalui konsep ini, terminal dilengkapi dengan sejumlah fasilitas seperti: area komersial bagi UMKM, kuliner, pelayanan publik, hotel, tempat belanja, ruang serbaguna dan lain sebagainya.

"Lokasi baru pembangunan terminal Purworejo ini lebih strategis dan tanahnya telah dihibahkan. Keberadaan terminal baru ini di-



Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi memberikan sambutan pada saat *Ground Breaking* Pembangunan Terminal Tipe A Purworejo, 21/5/2023. Foto: HMS DJPD/BYU

PEMBANGUNAN TERMINAL PURWOREJO BARU

Pembangunan terminal ini merupakan bagian dari program Revitalisasi Terminal Tipe A secara nasional yang dilakukan Kemenhub melalui Ditjen Perhubungan Darat. Revitalisasi dilakukan agar fasilitas dan layanan terminal semakin baik, sehingga dapat menumbuhkan budaya masyarakat untuk menggunakan bus.

harapkan dapat semakin meningkatkan pelayanan transportasi jalan seperti bus, "ujar Menhub.

Terminal baru ini dibangun di lokasi baru, yaitu sekitar 500 meter dari terminal yang lama (eksisting). Terminal lama telah beroperasi sejak tahun 1994 dan ditetapkan menjadi Terminal Tipe A mulai tahun 2003. Lokasinya berada di Kecamatan Banyu-urip, Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah, atau berada di seberang Mapolres Purworejo. Nantinya terminal lama yang aset tanahnya merupakan milik desa akan dikembalikan kepada pihak desa.

Menhub menyampaikan terima

kasih kepada Pemerintah Provinsi Jateng dan Pemerintah Kabupaten Purworejo, yang telah menghibahkan tanah seluas 1,18 hektar. "Sinergi antara pemerintah pusat dan daerah ini menjadi contoh baik bagi daerah lainnya, dalam rangka mewujudkan pelayanan angkutan darat yang selamat, aman, dan nyaman," ujar Menhub.

Lebih lanjut Menhub mengungkapkan, akan memberikan kesempatan kepada berbagai pihak baik itu BUMN, BUMD, swasta, untuk bekerjasama dalam pengembangan Terminal Penumpang Tipe A Purworejo melalui berbagai skema kerjasama pemerintah dan badan usaha. "Kami juga mendorong

tumbuhnya UMKM di Purworejo dan sekitarnya untuk memanfaatkan area *tenant* yang telah disediakan di area terminal," ucap Menhub.

Sementara itu, Gubernur Jateng Ganjar Pranowo menyambut baik dibangunnya terminal baru di Purworejo. Menurutnya, hal ini bisa dimanfaatkan oleh para pelaku seni, UMKM, dan juga masyarakat pengguna jasa transportasi bus. "Semoga dengan kehadiran terminal yang semakin lengkap fasilitasnya ini dapat meningkatkan perekonomian masyarakat di Purworejo dan sekitarnya," ujar Ganjar.



Ganjar Pranowo Gubernur Jawa Tengah

Pembangunan terminal yang dikelola oleh Kemenhub melalui Balai Pengelola Transportasi Darat (BPTD) Wilayah X Provinsi Jawa Tengah ini dibiayai dari Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) dan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) dengan total pagu anggaran Rp. 35

Miliar, yang dimulai tahun 2022 hingga tahun 2024. Mengingat pentingnya fungsi dari terminal ini, pembangunan terminal baru ditargetkan dapat selesai lebih cepat yaitu di akhir tahun 2023.

Gedung terminal baru akan dibangun lebih luas dari terminal lama, yaitu dengan luas sekitar 2.200 meter persegi dan akan dibangun 2 (dua) lantai. Adapun di lantai 1 akan digunakan untuk sarana parkir, area *drop off*, area tunggu keberangkatan, area tunggu kedatangan, area tiket dan sentra informasi, lift, area *tenant*, toilet, CCTV dan keamanan. Sementara, di lantai 2 terminal akan

digunakan untuk fasilitas area duduk kuliner, ruang tunggu dan penitipan barang, toilet, dan area kerja Korsatpel Terminal.

Terminal ini memiliki 6 (enam) area ruang tunggu keberangkatan, 6 (enam) area

keberangkatan parkir bus, dan 2 (dua) lajur kedatangan bus. Serta mampu menampung hingga 1.000-1.200 penumpang per hari dan melayani pergerakan sekitar 128 bus antar provinsi per hari.

Kehadiran Terminal Tipe A Purworejo akan menghubungkan Bandara Yogyakarta International Airport di Kulonprogo, dan sejumlah destinasi wisata seperti KSPN Borobudur dan Bendungan Bener. Selain akan meningkatkan konektivitas antar wilayah perkotaan dan antar provinsi, kehadiran terminal ini diharapkan dapat mendorong potensi pariwisata, dan meningkatkan perekonomian daerah.

Usai menghadiri kegiatan *groundbreaking* pembangunan terminal, Menhub bersama Gubernur Ganjar dan rombongan meninjau Stasiun Purworejo yang rencananya akan direaktivasi.

Turut hadir dalam acara *ground breaking*, Anggota komisi V Sujadi, Bupati Purworejo Agus Bastian, Dirjen Perhubungan Darat Hendro Sugiatno, dan Direktur Prasarana Transportasi Jalan Popik Montanasyah. (*)

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, Anggota Komisi V DPR RI Sujadi, Bupati Purworejo Agus Bastian, Direktur Jenderal Perhubungan Darat Hendro Sugiatno, serta pejabat terkait lainnya pada saat *Ground Breaking* Terminal Purworejo, 21/5/2023. Foto: HMS DJPD/BYU



Direktur Jenderal Perhubungan Darat, Hendro Sugiatno melakukan peletakan batu pertama (*groundbreaking*) pembangunan Terminal Tipe A Cepu, Kabupaten Blora, Jumat (16/6/2023). Dalam kesempatan tersebut Dirjen Hendro mengatakan bahwa Terminal Tipe A Cepu akan dioptimalkan fungsinya dengan mengusung konsep *New Terminal*.

“Dalam konsep *New Terminal* maka akan hadir sebuah Terminal Tipe A yang memiliki kearifan lokal sosial budaya. Dilengkapi dengan adanya fasilitas utama, fasilitas penunjang dan fasilitas komersil untuk mendukung pertumbuhan ekonomi wilayah,” katanya. Menurut Dirjen Hendro, konsep perencanaan terminal dibuat terintegrasi dengan pusat kegiatan masyarakat setempat seperti perkantoran, pendidikan, dan pemukiman serta mampu menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru wilayah (*mixuse*).

Dirjen Hendro melanjutkan, “Pembangunan Terminal Tipe A di Cepu ini fungsinya bukan hanya untuk menaikkan dan menurunkan penumpang tapi ada fungsi-fungsi

lain yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat Cepu. Seperti halnya untuk destinasi kuliner, sehingga terminal ini tumbuh dan hidup.”

Selain itu, tambahnya, juga akan dilakukan optimalisasi layanan terminal dengan pola kepengusahaan dalam rangka mendukung Pemulihan Ekonomi Nasional sebagaimana arahan

Bapak Presiden. “Kita tata agar lebih baik lagi dan nanti Insya Allah nanti akan menjadi bangunan yang representatif di Cepu dalam upaya kita memberikan pelayanan yang baik bagi masyarakat Cepu,” tuturnya.

Dalam kesempatan ini, Dirjen Hendro juga mengharapkan sinergitas antara Pemerintah

GROUND BREAKING TERMINAL CEPU

Dalam konsep *New Terminal* maka akan hadir sebuah Terminal Tipe A yang memiliki kearifan lokal sosial budaya. Dilengkapi dengan adanya fasilitas utama, fasilitas penunjang dan fasilitas komersil untuk mendukung pertumbuhan ekonomi wilayah.

Dirjen Perhubungan Darat Hendro Sugiatno, didampingi Plt. Direktur Prasarana Transportasi Jalan Susanty Pertiwi, Kepala BPTD Kelas II Jawa Tengah Eko Agus Susanto, Bupati Blora Arief Rohman, Anggota Komisi V DPR RI Sudewo dan pejabat terkait lainnya pada saat *Ground Breaking* Terminal Cepu, Blora, 16/6/2023. Foto: HMS DJPD/TOL



Balun, Kec. Cepu, Kabupaten Blora, Jawa Tengah. Pemerintah mengalokasikan dana anggaran Rp 32 miliar untuk pembangunan dan direncanakan selesai akhir tahun 2023.

Kita tata agar lebih baik lagi dan nanti Insya Allah nanti akan menjadi bangunan yang representatif di Cepu dalam upaya kita memberikan pelayanan yang baik bagi masyarakat Cepu.

Kementerian Perhubungan nantinya juga memberikan kesempatan kepada berbagai pihak, termasuk swasta, BUMN maupun BUMD untuk bekerjasama dalam pengembangan infrastruktur Terminal Penumpang Tipe A Cepu melalui berbagai skema kerjasama yang dapat melibatkan pihak ketiga.

Turut hadir dalam acara tersebut yakni anggota Komisi V DPR RI, Sudewo; Bupati Blora, Arief Rohman; Plt. Direktur Prasarana Transportasi Jalan, Susanty Pertiwi; Kepala BPTD Kelas II Provinsi Jawa Tengah, Eko Agus Susanto; Forkopimda Kabupaten Blora, serta pejabat terkait lainnya. (*)

Pusat dalam hal ini Kementerian Perhubungan dengan Pemerintah Kabupaten Blora menjadi contoh yang baik bagi daerah lainnya dalam mewujudkan peningkatan pelayanan yang aman, nyaman dan selamat kepada pengguna jasa transportasi jalan raya dan terminal sebagai simpulnya.

Sementara itu, Anggota Komisi V DPR RI, Sudewo menyampaikan, Terminal Tipe A Cepu nantinya tidak hanya menghadirkan fisik tetapi juga menghadirkan unsur keindahan, sosial, dan ekonomi. Dirancang dengan tingkat estetika yang tinggi. “Meskipun hadir secara modern tetapi tidak menggusur unsur tradisionalnya. Insya Allah

lingkungan juga akan diatur dengan baik,” ujarnya.

Pada kesempatan ini, Bupati Blora, Arief Rohman memohon dukungan untuk program-program yang dapat menunjang keberadaan Terminal Tipe A Cepu agar semakin mampu memberikan manfaat, selain bisa menyambungkan kota-kota di sekitar Cepu juga bisa menjangkau kabupaten-kabupaten yang lainnya.

Terminal tersebut dibangun dengan luas lahan 15.748 m2 di jalan Megal,



Dirjen Perhubungan Darat Hendro Sugiatno, Bupati Blora Arief Rohman, Anggota Komisi V DPR RI Sudewo dan pejabat terkait lainnya pada saat *Ground Breaking* Terminal Cepu, Blora, 16/6/2023. Foto: HMS DJPD/TOL



Dirjen Perhubungan Darat Hendro Sugiatno bersama para narasumber pada acara Rakernis PPNS Bidang Perhubungan Darat, Bali, 26/5/2023. Foto: HMS DJPD/MAD

PROFESIONALISME PPNS LLAJ: Sebuah Keharusan

Profesionalisme bagi PPNS LLAJ adalah sebuah keharusan. Keselamatan berkendara menjadi perhatian tertinggi dalam penanganan lalu lintas.

Direktur Jenderal Perhubungan Darat, Hendro Sugiatno menyatakan bahwa pihaknya menaruh perhatian besar terhadap fungsi penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan. Hal ini menurutnya sangat penting sebagai tulang punggung aktivitas kehidupan sosial, utamanya dalam pertumbuhan ekonomi terlebih di masa kini begitu banyak tantangan yang dihadapi dalam sektor transportasi. Dirjen Hendro menyatakan hal tersebut dalam sambutannya pada acara Rapat Kerja Teknis Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Tahun Anggaran 2023 di Hotel Merusaka Bali. Acara ini berlangsung pada Kamis (25/05) hingga Jumat (26/05).

“Kita sekarang menghadapi tantangan yang kompleks dan

dinamis dari segi pelayanan kepada masyarakat, teknologi kendaraan, dan tuntutan masyarakat atas kecepatan pelayanan. Salah satu upaya untuk menghadapi tantangan tersebut adalah bagaimana kita meningkatkan ilmu agar kemampuan kita dapat mengikuti perkembangan teknologi lalu lintas di masa depan,” demikian disampaikannya dalam pembukaan kegiatan tersebut.

Menurut Dirjen Hendro, Kementerian Perhubungan memiliki tanggung jawab dalam Rencana Umum Nasional Keselamatan (RUNK) Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah mengenai kendaraan yang

berkeselamatan. “Keselamatan menjadi tanggung jawab bersama dan salah satu yang harus kita sikapi adalah manajemen rekayasa lalu lintas. Ini tanggung jawab kita bersama bagaimana cara untuk menertibkan masyarakat dalam penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan yang ujungnya adalah keselamatan,” tambah Dirjen Hendro.

Selain itu, dalam melakukan tugasnya, menurut Dirjen Hendro seorang PPNS juga membutuhkan sikap profesionalisme.

“Profesionalisme adalah sebuah keharusan. Keselamatan berkendara menjadi perhatian tertinggi dalam penanganan lalu lintas. Di samping Sumber Daya Manusia (SDM) yang harus kita siapkan, kolaborasi antar stakeholder seperti saat Angleb merupakan contoh banyaknya apresiasi karena berjalan dengan baik atas bentuk sinergi antar stakeholder,” tambahnya.



Menurutnya pola sinergi dan kolaborasi dalam penyelenggaraan Angkutan Lebaran 2023 dapat menjadi patokan untuk meningkatkan koordinasi dan kerjasama dengan instansi lain di masa mendatang.

Dalam sambutannya, Dirjen Hendro menambahkan bahwa sebagai regulator, Kemenhub juga memiliki peran yang sangat penting dalam menyusun strategi penurunan angka kecelakaan lalu lintas.

“Kemenhub punya tugas dalam membangun kesadaran yang tepat untuk menurunkan kecelakaan dan tingkat fatalitas kecelakaan di masyarakat. Yang lebih penting adalah ketika keputusan hukum dikeluarkan

maka harus ditegakkan dengan sebaik-baiknya,” tegasnya.

Lebih lanjut lagi, Dirjen Hendro menyatakan bahwa masyarakat pengguna jalan menginginkan suatu kinerja penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan yang profesional, optimal, handal, dan tingkat keselamatan yang tinggi, sehingga diperlukan suatu langkah secara pro aktif dari pemerintah sebagai penyelenggara lalu lintas dan angkutan jalan.

“Keselamatan jalan tidak hanya bergantung pada ketertiban pengguna jalan saja, melainkan banyak hal yang harus diwujudkan. Masih banyak pekerjaan rumah (PR) yang harus kita perbaiki mulai dari peningkatan kemampuan Sumber Daya Manusia, kolaborasi antar stakeholders, serta kebijakan Perhubungan Darat terkait Jalan Nasional mulai dari Manajemen Rekayasa Lalu Lintas, Analisis Dampak Lalu Lintas dan Perengkapan Jalan,” ujarnya.

Upaya peningkatan SDM ini salah satunya melalui penambahan pengetahuan bagi para PPNS



Kasubdit Dalops Ditjen Perhubungan Darat Deny Kusdyana pada acara Rakernis PPNS Bidang Perhubungan Darat, Bali, 26/5/2023. Foto: HMS DJPD/MAD

dalam Penegakan Hukum Bidang LLAJ sehingga diharapkan PPNS dapat melakukan penanganan permasalahan pelanggaran angkutan umum dengan penegakan hukum berdasarkan bukti rekam elektronik.

Rapat Kerja Teknis PPNS Bidang LLAJ Tahun 2023 ini dihadiri sebanyak 136 peserta dari Balai

Pengelola Transportasi Darat (BPTD), Dinas Perhubungan Provinsi, Kota dan Kabupaten di seluruh Indonesia. Hadir dalam acara ini yaitu Direktur Lalu Lintas Jalan Cucu Mulyana, serta sejumlah narasumber dari Kementerian PUPR, Bappenas, KNKT, Korlantas POLRI, Kementerian Hukum dan HAM, Kejaksaan Agung RI, BPKP dan LKPP.*



BERBENAH ANGKUTAN SUNGAI DAN DANAU

Sungguh bukan merupakan pekerjaan yang mudah mengingat bahwa Kapal Sungai dan Danau di Indonesia ini sangat beragam, di BPTD banyak karakteristik jenis - jenis Kapal yang ada disana seperti Kapal kecil maupun Kapal besar bahkan Kapal Ferry Penyeberangan menjadi ranah Sungai dan Danau.



Balai Pengelola Transportasi Darat (BPTD) Wilayah XIV Provinsi Kalimantan Barat mengadakan kegiatan pengukuran kapal motor di Sungai Batu, Kabupaten Sanggau, Jumat 16/12/2022.

Sejalan dengan arahan Menteri Perhubungan untuk membenahi sistem angkutan sungai dan danau, Direktorat Transportasi Sungai, Danau dan Penyeberangan, Ditjen

Perhubungan Darat, mengadakan kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) Kelaiklautan Kapal Angkutan Sungai dan Danau di Hotel Mercure Tangerang Centre, Tangerang pada Rabu (14/06).

Ketua Tim Substansi Sarana Sungai dan Danau, Dit. TSDP, Eko Purwanto mewakili PLT. Direktur Transportasi Sungai, Danau dan Penyeberangan mengatakan kegiatan Bimtek ini sangat penting untuk meningkatkan pengetahuan mengenai kelaiklautan kapal khususnya penyelenggaraan kelaiklautan kapal angkutan di sungai dan danau.

“Seperti yang kita ketahui bersama berdasarkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah bahwa fungsi keselamatan pelayaran menjadi tugas pemerintah pusat dan dengan terbitnya PM 122 dan saat ini sudah disempurnakan menjadi PM 17 Tahun 2022 tentang organisasi dan tata kerja di Lingkungan Kementerian Perhubungan yang dimana bahwa aspek kelaiklautan kapal angkutan sungai dan danau penyeberangan menjadi tanggung jawab Direktorat Jenderal Perhubungan Darat,” ujar Eko.

Menurut Eko, terkait kelaiklautan kapal angkutan sungai dan danau, saat ini Direktorat Jenderal Perhubungan Darat telah memiliki peraturan dengan nomor KP.3424/AP.402/DRJD/2020 tentang kapal sungai dan danau.

Penyelenggaraan Kelaiklautan Kapal Sungai dan Danau antara lain meliputi aspek:

- Keselamatan Kapal;
- Pencegahan Pencemaran dari Kapal;
- Pengawakan Kapal;
- Status Hukum Kapal;
- Garis Muat Kapal.

Eko menjelaskan, “Sebagai informasi Direktorat Transportasi Sungai, Danau dan Penyeberangan sedang menyusun Rancangan Peraturan Menteri (RPM) Perhubungan

terkait dengan Kelaiklautan Kapal Angkutan Sungai dan Danau. RPM ini akan menggantikan perdirjen saat ini sebagai pedoman kita sehingga kedepan mempunyai regulasi yang lebih kuat dalam melaksanakan fungsi Kelaiklautan Kapal Angkutan Sungai dan Danau.”

Eko mengatakan bahwa menjalankan fungsi kelaiklautan kapal sungai dan danau bukanlah hal yang mudah. “Sungguh bukan merupakan pekerjaan yang mudah mengingat bahwa Kapal Sungai dan Danau di Indonesia ini sangat beragam, di BPTD banyak karakteristik jenis - jenis Kapal yang ada disana seperti Kapal kecil maupun Kapal besar bahkan Kapal Ferry Penyeberangan menjadi ranah Sungai dan Danau,”lanjutnya.

Sasaran (*outcome*) dari Bimtek Kelaiklautan Kapal Angkutan Sungai dan Danau untuk mempersiapkan dan meningkatkan sumber daya manusia di bidang Kelaiklautan Kapal Sungai dan Danau dan mendukung penyelenggaraan keselamatan

dan keamanan Transportasi SDP serta mampu melaksanakan pemeriksaan Kapal barang Angkutan Sungai dan Danau. Dalam Bimtek ini diharapkan semua peserta dapat berperan aktif menyampaikan pengalaman, permasalahan di lapangan untuk didiskusikan dengan para narasumber.

Bimtek ini dihadiri oleh 23 peserta yang terdiri dari perwakilan BPTD di Lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat. Materi yang

diberikan kepada peserta adalah Pemeriksaan Kapal Barang Angkutan Sungai dan Danau (Konstruksi, Permesinan, Radio, dan Peralatan Navigasi), dengan narasumber dari PT. Biro Klasifikasi Indonesia (Persero). Selain itu ada juga *Pre Test* dan *Post Test* untuk para peserta Bimtek yang bertujuan meningkatkan keselamatan dan keamanan transportasi SDP serta mampu melaksanakan pemeriksaan kapal barang angkutan sungai dan danau. (*)



Alur Sungai Batanghari



Direktorat Transportasi Sungai, Danau dan Penyeberangan, Ditjen Perhubungan Darat, mengadakan kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) Kelaiklautan Kapal Angkutan Sungai dan Danau di Hotel Mercure Tangerang Centre, Tangerang pada Rabu (14/06).

Data dari Direktorat Transportasi, Sungai, Danau dan Penyeberangan (TSDP) Ditjen Hubdat Kemenhub, sebanyak 357 lintasan angkutan penyeberangan yang terdiri dari 80 lintasan komersial, 274 lintasan perintis dan 3 LDF. Untuk lintasan komersial terbagi 22 lintasan antar provinsi (27 persen), 46 lintasan dalam provinsi (58,5 persen) dan 12 lintasan dalam kabu/kota (14,6 persen). Sementara lintasan perintis terbagi atas 23 lintasan antara provinsi (8,4 persen), 112 lintasan dalam provinsi (40,9 persen) dan lintasan dalam kab/kota (50,7 persen).

Di samping itu, total 432 kapal lintasan angkutan penyeberangan yang terbagi 326 kapal lintasan komersial, 105 kapal lintasan perintis dan 1 LDF. Jumlah kapal lintasan komersial (326 kapal) terbagi atas 23 kapal lintasan antar provinsi (71, persen), 112 kapal lintasan dalam provinsi (34,4 persen) dan 139 kapal lintasan dalam kab/kota (42,6 persen). Untuk 105 kapal lintasan perintis terdiri dari 12 kapal lintasan antar provinsi (11,4 persen), 44 kapal lintasan dalam provinsi (41,9 persen) dan 49 kapal lintasan dalam kab/kota (47 persen).

KESIAPAN PELABUHAN PENYEBERANGAN JADI LEBIH BAIK

Oleh: **Djoko Setijowarno**



Infrastruktur pendukung untuk melaksanakan regulasi membenahi penyelenggaraan transportasi penyeberangan sudah siap.

Berdasarkan kepemilikan kapal penyeberangan yang ada, diketahui kapal penyeberangan yang dikelola oleh BUMN PT ASDP Indonesia Ferry sebanyak 161 (37,26 persen) kapal penyeberangan dan 1 (0,24 persen) kapal Penyeberangan LDF; dan yang dikelola oleh BUMD sebanyak 21 (4,86 persen) kapal penyeberangan. Sedangkan kapal penyeberangan yang

dikelola oleh swasta sebanyak 249 kapal (57,64 persen). Artinya masih cukup besar peranan swasta dalam membantu pemerintah menyelenggarakan transportasi penyeberangan di Indonesia.

Informasi yang diperoleh dari PT ASDP Indonesia Ferry (Mei 2023), ada 50 golongan keberadaan orang yang beraktivitas di

pelabuhan penyeberangan. Adapun golongan itu, meliputi penggunaan jasa penumpang (pejalan kaki, di atas kapal), karyawan/ti PT ASDP, pegawai (BPTD, KKP), personil (TNI AD, TNI AL, Polri, KSKP), karyawan (PT Jasa Raharja, PT Jasa Raharja Putra, Bank, PT Telkom, perusahaan pelayaran, vendor, koperasi), anggota IIKA Sundari, tamu, petugas (PT PLN, *outsourcing security*, *outsourcing loket*, *outsourcing cleaning service*, *outsourcing boarding bridge*, *outsourcing air tawar*, bunker BBM, jerambah, SAR, kepil, penyewa, UMKM, pengangkut sampah, pemadam kebakaran), siswa magang, takmir masjid, pengunjung makam, penyewa (ruangan, lahan), pedagang (asongan, koran), sales produk, pengurus (bus, truk), tukang pijit, ojek, jangkrik, petruk (pengatur truk), kuli panggul, sopir angkot, jamu panggul, wartawan, dan LSM.

Di sisi lain, keberadaan orang yang beraktivitas di atas kapal ada 17 aktivitas. Yang memenuhi ketentuan meliputi nakhkoda dan *crew* kapal, kadet (mahasiswa/siswa praktek laut), penumpang (bertiket), security (bersertifikat), pramugari (bersertifikat), *cleaning service* (bersertifikat), dan petugas kantin (bersertifikat). Sementara yang tidak memenuhi ketentuan, meliputi keluarga ABK (tidak bersertifikat), volunteer, pemain organ, pedagang asongan, tukang pijat, pengedar sumbangan, penyanyi, penjual jamu, anak koin, dan pengguna fasilitas SAB.

Pasal 145 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran, menyebutkan setiap orang dilarang mempekerjakan seseorang di kapal dalam jabatan apapun tanpa disijil dan tanpa memiliki kompetensi dan ketrampilan serta dokumen pelaut yang dipersyaratkan. Maka dari itu, 50 golongan orang



Kendaraan melintasi *movable bridge*, keluar dari kapal menuju ke dermaga, di Pelabuhan Penyeberangan Gilimanuk, Bali.

yang beraktivitas di Pelabuhan penyeberangan harus ditertibkan sesuai regulasi yang berlaku. PT Kereta Api Indonesia sudah memberikan contoh menertibkan sejumlah orang yang tidak berkepentingan di dalam peron stasiun dilarang masuk. Awalnya memang ada penolakan, namun dengan berjalannya waktu dan ada konsistensi penegakan aturan hasilnya seperti sekarang ini. Ketertiban di kawasan dalam stasiun terjaga dengan baik dan kenyamanan bagi penumpang menjadi dambaan.

Hal yang sama dapat dilakukan di sekitar Kawasan Pelabuhan Penyeberangan. Di dalam kapal adalah orang yang bertugas dan penumpang benar-benar sudah memiliki tiket naik kapal. Penumpang dapat menunggu di ruang terminal penumpang yang sudah disediakan. Jika kapal sudah siap, barulah penumpang diijinkan masuk ke kapal. Sekarang ini, sejumlah terminal penumpang dalam kondisi sepi penumpang. Kendaraan masuk kapal dengan membawa penumpang.

Mestinya, kendaraan roda 4 atau lebih hanya dibawa oleh pengemudi. Penumpang diturunkan dan menunggu di ruang tunggu terminal penumpang. Setelah masuk ke dalam kapal, pengemudi wajib

meninggalkan kendaraan. Selama kapal berlayar, tidak diijinkan ada orang di dalam kendaraan yang dibawa kapal penyeberangan.

Kondisi infrastruktur pendukung di pelabuhan penyeberangan untuk melakukan ini sudah siap. Sekarang tinggal melaksanakan regulasi yang sudah ada. Setiap penumpang wajib membayar tiket perorangan.

Sebagian besar kapal penyeberangan yang beroperasi di Indonesia masih belum bisa memenuhi persyaratan layanan bagi lansia, anak-anak dan disabilitas. Pedoman SPM Kapal Penyeberangan mestinya sudah mencantumkan perhatian kebutuhan bagi lansia, anak-naka dan disabilitas.

Saat ini terdapat 236 Pelabuhan Penyeberangan yang telah terbangun dan 19 KDP. Dari 236 Pelabuhan Penyeberangan itu, sebanyak 229 pelabuhan penyeberangan telah beroperasi dan 7 pelabuhan penyeberangan belum beroperasi. Pelabuhan penyeberangan yang beroperasi itu, 34 pelabuhan penyeberangan milik PT ASDP Indonesia Ferry, 18 pelabuhan penyeberangan (Satpel Ditjen. Hubdat), 173 pelabuhan penyeberangan (pemda) dan 4 pelabuhan penyeberangan (swasta).(*)





Pembahasan Rancangan Kerangka Kelembagaan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat di Jakarta, 5/6/2023. Foto: HMS/WBW

RANCANGAN KERANGKA KELEMBAGAAN DITJEN HUBDAT

Menindaklanjuti harapan Presiden RI untuk menciptakan birokrasi pemerintahan yang lebih profesional, lincah, dan dinamis, dibutuhkan kelembagaan yang sesuai serta mampu menjawab permasalahan secara menyeluruh dan berkelanjutan. Hal tersebut disampaikan Kepala Bagian Sumber Daya Manusia dan Umum, Dadan M Ramdan di Jakarta saat membuka rapat pembahasan rancangan kerangka kelembagaan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat pada Senin (5/6).

Dadan menjelaskan maksud dan tujuan dari penyelenggaraan kegiatan ini yakni, "Mengetahui arah kebijakan dan strategi perhubungan darat yang sesuai dengan permasalahan transportasi darat untuk jangka 5 sampai 10 tahun ke depan".

Secara ideal struktur organisasi harus bersifat dinamis sebagai konskuensi dari adaptasi terhadap dinamika perubahan lingkungan internal dan eksternal, sehingga struktur organisasi yang baik adalah yang mampu beradaptasi secara responsif maupun antisipatif terhadap tuntutan perubahan lingkungan." Organisasi yang ideal bukan cerminan dari realitas, tetapi menggambarkan bagaimana seharusnya organisasi

disusun dan dirancang agar menjadi lebih efisien" ujar Dadan.

Di sisi lain Direktorat Jenderal Perhubungan Darat, sebagai unit kerja di lingkungan Kementerian Perhubungan mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan dan standarisasi teknis di bidang perhubungan darat sangat berkepentingan untuk mewujudkan layanan transportasi darat yang menjunjung tinggi nilai kemanusiaan yang berkeadilan, selamat, aman, mudah dijangkau, berkualitas, berdaya saing tinggi, memberikan nilai tambah dan terintegrasi dengan moda transportasi lainnya serta dapat dipertanggungjawabkan.

Dadan menjelaskan, "Evaluasi terhadap kelembagaan pemerintahan merupakan hal yang sangat perlu dan penting sekali dilakukan, hal ini mengingat tantangan semakin berat sehingga perlu adanya gambaran, apakah organisasi kelembagaan yang ada saat ini telah sesuai atau belum dengan tantangan tersebut".

la melanjutkan, evaluasi kelembagaan hanya salah satu upaya yang harus dilakukan untuk meningkatkan kinerja dan layanan dalam rangka mencapai sasaran strategis yang sudah ditetapkan dengan beberapa upaya lainnya

REFORMASI BIROKRASI

seperti : Peningkatan kapasitas dan kompetensi Sumber Daya Manusia, reviu proses bisnis dan Standar Operasional Prosedur secara berkelanjutan, Integrasi peningkatan kualitas pengawasan, penyesuaian struktur pengorganisasian, sinkronisasi dan peningkatan kualitas regulasi, integritas sistem pelayanan angkutan umum serta peningkatan utilisasi sarana dan prasarana transportasi darat.

Pada akhir sambutannya, Dadan berharap kegiatan ini nantinya memberikan gambaran alternatif organisasi Ditjen Perhubungan Darat yang tepat fungsi, tepat proses dan tepat ukuran, agar mampu meningkatkan kinerja dalam mencapai seluruh target pembangunan yang telah ditetapkan guna mendukung percepatan capaian visi dan misi organisasi.

Acara ini dihadiri oleh para pimpinan tinggi seluruh unit kerja di lingkungan Ditjen Perhubungan Darat dan para Kepala Dinas Perhubungan Provinsi/Kabupaten/Kota yang dilaksanakan selama dua hari dari tanggal 5 s.d 6 Juni 2023 dengan membahas isu mengenai kelembagaan penyelenggaraan Perhubungan Darat berdasarkan prioritas Bapak Presiden dalam RPJMN dan RPJPN 2025-2045, implementasi transportasi yang berkelanjutan dan berkeadilan, sistem transportasi barang yang terintegrasi, indikator kelembagaan yang mampu menjawab masalah Transportasi Darat.

Turut hadir menjadi narasumber dalam kegiatan tersebut Dail U-mamil Asri, Direktur Transportasi, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS), Gong-gomtua Sitanggung, *Interim Director Institute For Transportation And Development Policy* (ITDP), Lilik Wachid Susilo perwakilan *Transport Studies Community* (TRANSCO), Muhamad Isnaeni, Wakil Ketua Majelis Profesi dan Etik Masyarakat Transportasi Indonesia.(HMSDJPD/SK)(*)

INFO SELINTAS

UMUM

PENCANANGAN ZONA INTEGRITAS MENUJU PREDIKAT WBK DAN WBBM



Direktorat Jenderal Perhubungan Darat melakukan pencanangan Zona Integritas Menuju Predikat Wilayah Bebas Korupsi (WBK)/ Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) pada Kamis (13/04) di Jakarta.

Dalam kegiatan ini, Direktur Jenderal Perhubungan Darat, Hendro Sugiatno selain menekankan pentingnya koordinasi juga menyampaikan pentingnya untuk menjaga integritas.

"Tanpa integritas semuanya akan menjadi nol. Integritas berkaitan de-

ngan komitmen, kejujuran, serta tidak melakukan tindakan-tindakan tercela. Integritas menjadi hal yang nomor 1," ujarnya.

Pencanangan Zona Integritas merupakan salah satu upaya penguatan pengawasan yang memiliki arti penting karena menjadi tonggak kesungguhan seluruh pimpinan dan pegawai di lingkungan Ditjen Hubdat dalam mewujudkan keberlanjutan zona integritas.

"Saat ini saya memandang perlu melaksanakan pencanangan kembali Zona Integritas selain untuk memotivasi kembali semua pejabat dan pegawai di seluruh unit kerja di lingkungan Ditjen Hubdat dalam membangun Zona Integritas menuju predikat WBK dan WBBM juga karena selama periode tahun 2019-2023 terjadi pergantian beberapa pejabat tinggi pratama dan pejabat administrator pada UPT Ditjen Hubdat," kata Dirjen Hendro.

Dirjen Hendro menambahkan, "Mari kita berkomitmen untuk itu sehingga apa yang kita kerjakan dan rencanakan. Jadi integritas dan komitmen harus menjadi catatan bagi kita untuk melaksanakannya. Apa yang sudah baik dipertahankan dan apa yang belum baik mari kita perbaiki."

Oleh karena itu dalam acara tersebut dimintasi seluruh pejabat eselon II dan Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat se Indonesia di lingkungan Ditjen Hubdat yang hadir untuk turut menandatangani komitmen dalam mewujudkan kawasan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK)/ Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) sebagai wujud dukungan pada upaya melanjutkan dan memperkuat pembangunan ZI sebagai kelanjutan dari pencanangan Zona Integritas terdahulu di lingkungan Ditjen Hubdat.

Selain itu, juga dilakukan penandatanganan komitmen penerapan pengendalian gratifikasi serta deklarasi anti pungutan liar di lingkungan Ditjen Hubdat.(*)

LALU LINTAS

LIBUR PANJANG WAISAK, DITJEN HUBDAT-KORLANTAS POLRI BATASI OPERASIONAL ANGKUTAN BARANG



Menjelang libur panjang memperingati Hari Lahir Pancasila dan Hari Raya Waisak, Direktorat Jenderal Perhubungan Darat bersama dengan Korlantas Polri telah menerbitkan Keputusan Bersama Nomor: KP-DRJD 4125 Tahun 2023, SKB/76/V/2023 Tentang Pengaturan Lalu Lintas Jalan Selama Libur Panjang Memperingati Hari Lahir Pancasila dan Hari Raya Waisak Tahun 2023.

"Untuk menjamin keselamatan, keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas dan angkutan jalan serta mengoptimalkan penggunaan dan pergerakan lalu lintas pada ruas jalan tol dan

non tol selama libur panjang Hari Lahir Pancasila dan Hari Raya Waisak, maka kami sepakat untuk melakukan pembatasan operasional angkutan barang," kata Direktur Jenderal Perhubungan Darat, Hendro Sugiatno.

Pembatasan operasional angkutan barang dilakukan terhadap mobil barang dengan Jumlah Berat Yang Diizinkan (JBI) lebih dari 14.000 kilogram, bersumbu 3 atau lebih, mobil barang dengan kereta tempelan, kereta gandengan, dan mobil pengangkut hasil galian, hasil tambang, maupun bahan bangunan.

"Pembatasan kami berlakukan mulai hari Rabu, 31 Mei 2023 pukul 14.00 WIB sampai dengan pukul 24.00 WIB. Kemudian pada hari Kamis, 1 Juni 2023 pukul 06.00 WIB sampai dengan pukul 12.00 WIB. Setelah itu dilanjutkan pada hari Minggu, 4 Juni 2023 pukul 14.00 WIB sampai dengan pukul 24.00 WIB," jabar Dirjen Hendro. Pembatasan operasional angkutan barang ruas diberlakukan

pada jalan tol sebagai berikut:

- DKI Jakarta dan Jawa Barat: Jakarta - Cikampek; dan
- Jawa Barat:
 - Cikampek - Purwakarta - Padalarang - Cileunyi; dan
 - Cikampek - Palimanan.

Sementara pada ruas jalan non tol berlaku pada:

- DKI Jakarta - Jawa Barat: Jakarta - Bekasi - Cikampek - Pamanukan - Cirebon; dan
- Jawa Barat: Cikampek - Purwakarta - Cikalong - Padalarang - Cileunyi.

"Ketentuan ini tidak berlaku bagi angkutan barang pengangkut BBM atau BBG, ternak, pupuk, pakan ternak, hantaran uang, serta bahan makanan pokok," tambah Dirjen Hendro.

Bagi angkutan barang yang mendapatkan pengecualian harus dilengkapi dengan surat muatan yang diterbitkan oleh pemilik barang yang diangkut. Surat muatan berisi keterangan jenis barang yang diangkut, tujuan pengiriman barang, nama dan alamat pemilik barang, serta ditempelkan pada kaca depan sebelah kiri angkutan barang.(*)

TSDP

DITJEN HUBDAT LAUNCHING SURAT PERSETUJUAN BERLAYAR (SPB) ONLINE

Launching Aplikasi Penerbitan Surat Peretujuan Berlayar (SPB) Online Pada Lintas Penyeberangan Merak - Bakauheni



Direktur Jenderal Perhubungan Darat, Hendro Sugiatno melakukan *Soft Launching* Surat Peretujuan Berlayar Online untuk Lintas Penyeberangan Merak-Bakauheni pada Kamis (13/04) di Jakarta.

Dalam rangka mendukung program pemerintah untuk mewujudkan sistem pemerintahan yang baik dan berbasis elektronik maka setiap pihak dapat

turut serta mendukung pelayanan transportasi berbasis sistem informasi sehingga menghasilkan efisiensi pada sistem pelayanan transportasi sungai, danau, dan penyeberangan,” lanjut Dirjen Hendro.

la menambahkan bahwa pelayanan berbasis elektronik tersebut akan dilakukan secara bertahap dan mulai diimplementasikan di lintas Merak-Bakauheni melalui *soft launching* penerbitan surat persetujuan berlayar *online*.

“Hari ini kami juga mengadakan *soft launching* penerbitan surat persetujuan berlayar *online*. Sementara terkait aspek keselamatan dan keamanan pelayaran terutama pelayanan kapal-kapal penyeberangan maka diminta agar dilakukan pengaturan lalu lintas baik di alur pelayaran maupun kolam pelabuhan secara profesional,” urai Dirjen Hendro

Menurutnya, khusus di Selat Sunda terutama lintas Merak-Bakauheni ada jalur pelayaran internasional yang sudah dilengkapi dengan *Traffic Separation System* (TSS) sehingga harus ada SOP

bersama antara *Vessel Traffic System* (VTS) dan *Local Port Services* (LPS) yang sangat diperlukan dalam pelaksanaan pengaturan lalu lintas kapal sehingga jelas kewenangan antara LPS dan VTS.

“Sebagai tindak lanjut rekomendasi dari Kemenko Marves, hari ini juga dilakukan kegiatan penandatanganan Standar Operasional Prosedur (SOP) Bersama antara Distrik Navigasi Tanjung Priok dengan Balai Pengelola Transportasi Darat (BPTD) Lampung dan BPTD Banten tentang Prosedur Bersama Pelayanan Lalu Lintas Kapal antara VTS Merak dengan LPS Pelabuhan Penyeberangan Merak dan LPS Pelabuhan Penyeberangan Bakauheni,” pungkas Dirjen Hendro.

Turut hadir dalam kegiatan ini yaitu Dirjen Perhubungan Laut Arif Toha, Kepala Pusat Pengelolaan Transportasi Berkelanjutan (PPTB) Marwanto Heru Santoso, serta seluruh jajaran pejabat eselon II di lingkungan Ditjen Hubdat, dan seluruh Kepala BPTD se Indonesia. (*)

Pada kesempatan yang sama, Kepala Bagian SDM dan Umum, Dadan M Ramdan menuturkan penyusunan kriteria BPTD ini penting dilakukan sebagai dasar penentuan kelas dan identifikasi kebutuhan peningkatan/pengelolaan unsur-unsur pokok dan unsur-unsur penunjang ke depan.

“Sebelumnya sudah dibentuk 25 BPTD dengan pendekatan Tipologi (Tipe A, B, dan C), kini dengan izin Menteri PAN-RB, dibentuk 33 BPTD dengan pendekatan kelas atau klasifikasi. Hal ini sebagai upaya penyederhanaan birokrasi sesuai dengan cita-cita Reformasi Birokrasi,” papar Dadan.

Setelah acara sosialisasi selesai, kegiatan dilanjutkan dengan kunjungan lapangan ke Kantor BPTD Kelas III D.I Yogyakarta dan Terminal Tipe A Giwangan.

Kegiatan ini dihadiri oleh Kepala Bagian Hukum dan Humas, Aznal, dan diikuti oleh 93 peserta yang terdiri dari perwakilan setiap Direktorat Teknis, Para Kepala BPTD di Pulau Jawa dan Kalimantan, serta Para Pengawas Satuan Pelayanan Wilayah Kerja BPTD Jawa Tengah dan D.I Yogyakarta. (*)

UMUM

TINGKATKAN EFISIENSI DAN EFEKTIVITAS ORGANISASI, DITJEN HUBDAT BENTUK BPTD DI 33 PROVINSI



Direktorat Jenderal Perhubungan Darat membentuk Balai Pengelola Transportasi Darat (BPTD) di 33 provinsi sebagai ujung tombak dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya di daerah. Hal itu dilakukan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas organisasi khususnya dalam mengelola dan menangani permasalahan transportasi darat. Pembentukan 33 BPTD dari yang semula 25 BPTD didasari oleh Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 5 Tahun 2023 Tentang Kriteria Klasifikasi Organisasi Balai Pengelola Transportasi Darat dan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 6 Tahun 2023 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengelola Transportasi Darat.

“BPTD merupakan perpanjangan tangan Ditjen Perhubungan Darat di daerah terutama dalam menjalankan tugas pokok mengelola Terminal Tipe A, Jembatan Timbang dan Pelabuhan Penyeberangan. Saat ini BPTD dibagi menjadi 3 kelas yaitu Kelas I, Kelas II dan Kelas III. Nantinya diharapkan masing-masing BPTD akan mengalami peningkatan kelas,” ujar Sekretaris Direktur Jenderal Perhubungan Darat, Amirulloh saat membacakan sambutan secara virtual pada kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan Bidang Perhubungan Darat Tahun 2023 di Yogyakarta (8/6).

Lebih lanjut Amirulloh menyampaikan dengan telah ditetapkannya 33 BPTD ini diharapkan semua bisa segera bekerja secara maksimal karena akan membawa citra dari Ditjen Perhubungan Darat itu sendiri.

“BPTD wajib menunjukkan kinerja terbaik dan dapat mengoptimalkan aset. Jangan sampai ada penyimpangan di lapangan,” jelas Amirulloh.

LALU LINTAS

DITJEN HUBDAT - KORLANTAS POLRI BATASI OPERASIONAL ANGKUTAN BARANG SELAMA LIBUR IDUL ADHA



Pemerintah telah menetapkan cuti bersama dan libur nasional dalam rangka Hari Raya Idul Adha Tahun 2023 yang jatuh pada 28-30 Juni 2023. Oleh karena itu, demi menjaga kondisi lalu lintas tetap kondusif maka Direktorat Jenderal Perhubungan Darat dan Korlantas Polri telah menerbitkan Keputusan Bersama Nomor: KP-DRJD 4583 Tahun 2023 dan SKB/89/VI/2023 Tentang Pengaturan Lalu Lintas Jalan Selama Masa Libur Panjang Memperingati Hari Raya Idul Adha Tahun 2023.

“Kami akan mengoptimalkan penggunaan dan pergerakan lalu lintas pada ruas jalan tol dan non tol selama masa libur panjang memperingati Idul Adha Tahun 2023. Pada 22 Juni 2023 juga telah dikeluarkan kesepakatan bersama antara Ditjen Hubdat dan Korlantas Polri untuk melakukan pembatasan operasional angkutan barang,” ujar Direktur Jenderal Perhubungan Darat, Hendro Sugiatno.

Pengaturan pembatasan operasional angkutan barang dilakukan terhadap mobil barang dengan Jumlah Berat Yang Diizinkan (JBI) lebih dari 14.000 (empat belas ribu) kilogram, mobil barang dengan sumbu 3 (tiga) atau lebih, mobil barang dengan kereta tempelan dan gandengan, maupun mobil barang yang digunakan untuk pengangkutan seperti hasil galian meliputi tanah pasir dan/atau batu, hasil tambang, bahan bangunan.

“Waktu pembatasan operasional angkutan barang diberlakukan mulai pada hari Selasa, 27 Juni 2023 pukul 16.00 WIB sampai dengan pukul 24.00 WIB. Kemudian hari Rabu, 28 Juni 2023 pukul 06.00 WIB sampai dengan pukul 13.00 WIB. Dilanjutkan hari Minggu, 2 Juli 2023 pukul 14.00 WIB sampai dengan pukul 24.00 WIB,” kata Dirjen Hendro. (*)

PRASARANA

MENHUB CEK PELAYANAN ANGKUTAN MASSAL DI PEKANBARU



Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi melakukan pengecekan pelayanan angkutan massal di Pekanbaru, Riau, Minggu (11/6). Dalam kunjungannya, Menteri meninjau Terminal Tipe A Bandar Raya Payung Sekaki Pekanbaru.

Menhub ingin memastikan pelayanan angkutan massal di daerah terus meningkat dengan standar keselamatan dan keamanan yang baik.

LALU LINTAS

PERBARUI SYARAT PERJALANAN DARAT, DITJEN HUBDAT TERBITKAN SE 14/2023



Menindaklanjuti SE Satgas Penanganan Covid-19 Nomor 1 Tahun 2023 maka per 9 Juni 2023, Kementerian Perhubungan melalui Direktorat Jenderal Perhubungan Darat menetapkan Surat Edaran mengenai protokol kesehatan pelaku perjalanan orang dengan transportasi darat. Ditjen Hubdat mengeluarkan SE Nomor 14 Tahun 2023 Tentang Protokol Kesehatan Pelaku Perjalanan Orang dengan Transportasi Darat pada Masa Transisi Endemi Covid-19.

Dalam SE 14 Tahun 2023 disebutkan bahwa kini masyarakat diperbolehkan tidak menggunakan masker jika dalam keadaan sehat dan tidak berisiko terhadap Covid-19. Masyarakat juga dianjurkan tetap menggunakan masker yang

“Saya datang ke sini untuk menyampaikan amanat Pak Presiden. Pesannya adalah untuk mengupayakan angkutan massal agar menjadi pilihan utama masyarakat. Oleh karenanya kami harus merencanakan, menganggarkan, mengeksekusi, dan mengawasi jalannya transportasi angkutan massal ini,” ujar Menhub dalam apel pagi di Terminal Bandar Raya Payung Sekaki.

Menhub menekankan, Indonesia merupakan salah satu negara dengan pertumbuhan penduduk tertinggi. Di kota besar dengan penduduk banyak, penggunaan kendaraan pribadi yang masif justru akan menyebabkan macet dan polusi. Maka, penting untuk seluruh elemen mengampanyekan penggunaan angkutan massal.

Terminal BRPS melayani trayek bus ke 48 kota/kabupaten antar kota antar provinsi (AKAP) yang tersebar di Sumatera dan Jawa serta ke 24 kota/kabupaten antar kota dalam provinsi (AKDP) Riau. (*)

tertutup dengan baik apabila dalam keadaan tidak sehat atau berisiko Covid-19, sebelum dan saat melakukan perjalanan dan kegiatan di fasilitas publik.

“Dengan SE 14 Tahun 2023 ini maka kami berharap seluruh pelaku perjalanan dalam dan luar negeri dengan moda transportasi darat tetap dapat menjaga dirinya sendiri serta mencegah penularan Covid-19. Dalam SE 14 Tahun 2023 kami menganjurkan masyarakat tetap melakukan vaksinasi hingga dosis booster kedua,” ujar Direktur Jenderal Perhubungan Darat, Hendro Sugiatno.

Melalui SE tersebut, Dirjen Hendro mengimbau masyarakat tetap membawa *hand sanitizer* atau tetap mencuci tangan dengan sabun secara berkala.

“Dimohon untuk tetap menjaga jarak saat berada di lokasi kerumunan orang terutama jika merasa dalam keadaan tidak sehat dan berisiko. Selain itu dimohon tetap menggunakan aplikasi SATUSEHAT untuk memonitor kesehatan pribadi,” ujar Dirjen Hendro.

Melalui SE 14 Tahun 2023 ini, seluruh penyelenggara dan operator moda transportasi darat dianjurkan untuk tetap melakukan perlindungan kepada masyarakat melalui upaya preventif dan promotif untuk mengendalikan penularan Covid-19. (*)



Anggota Delegasi RI dari Direktorat Jenderal Perhubungan Darat bersama delegasi dari negara anggota ASEAN lainnya pada saat pertemuan *The 35th Meeting of the ACCSQ Automotive Product Working Group (ACCSQ APWG)* di Thailand, 24-25 Mei 2023.

Pertemuan *The 35th Meeting of the ACCSQ Automotive Product Working Group (ACCSQ APWG)*

Direktur Sarana Transportasi Jalan Danto Restyawan sebagai ketua Delegasi RI pada pertemuan *35th ACCSQ APWG* yang diselenggarakan di Thailand, 24-25 Mei 2023 menyampaikan bahwa saat ini Indonesia sedang dalam proses pembangunan fasilitas *Proving Ground* untuk Pusat Sertifikasi Uji Kendaraan di Bekasi, nantinya diharapkan dapat beroperasi pada tahun 2025.

“Sesuai dengan arahan Presiden Republik Indonesia Bapak Joko Widodo, bahwa *Proving Ground* merupakan strategi penting untuk peningkatan ekosistem sektor otomotif di Indonesia, maka dari itu saat ini Indonesia sedang membangun *Proving Ground* di Bekasi,” kata Danto.

Pada tanggal 31 Oktober 2022 PT. Indonesia *International Automotive Proving Ground* telah resmi dan menandatangani kontrak kerjasama untuk proyek *Proving Ground* Bekasi, dan pada tanggal 31 Maret 2023 telah menjadi tanggal efektif untuk dimulainya masa konstruksi dan ditargetkan beroperasi pada tanggal 7 April 2025.

Rombongan delegasi Direktorat Jenderal Perhubungan Darat pada

hari terakhir juga melaksanakan kunjungan lapangan ke Kantor Isuzu Thailand dan Karoseri NTT (*Nonhaburi Trailer Truck*) Isuzu sebagai koordinasi lanjutan dari kegiatan pertemuan *The 7th AAC* dan *The 35th ACCSQ-APWG* untuk menyempurnakan kegiatan ASEAN MRA selanjutnya serta untuk melihat lebih dekat komparasi antara karoseri di Thailand dengan di Indonesia.

Kunjungan ini dilakukan sebagai langkah dalam penyusunan bahan evaluasi terkait teknologi kendaraan bermotor untuk menyempurnakan regulasi dan kebijakan serta koordinasi terkait pengujian tipe kendaraan bermotor di Thailand dan persiapan *Proving Ground* di BPLJSKB dimana memerlukan beberapa referensi terkait administrasi persiapan manajemen laboratorium yang akan dibangun di BPLJSKB.

Menanggapi perkembangan perusahaan karoseri yang terus berkembang di Indonesia dan untuk mewujudkan *Zero-ODOL (Over Dimension Over Loaded)* maka perlunya informasi dari Pemerintah Thailand dalam melaksanakan pengawasan kepada perusahaan karoseri yang berada di Thailand. Tindak lanjut atas hasil dari rangka-

ian Pertemuan *The 35th Meeting of the ACCSQ APWG* adalah Direktorat Jenderal Perhubungan Darat dapat berkomunikasi secara intens dengan Pusat Fasilitas Kemitraan dan Kelembagaan Internasional agar dapat berkoordinasi dengan Kementerian/Lembaga terkait untuk mengawal proses ratifikasi ASEAN AP-MRA (*Automotive Product - Mutual Recognition Arrangement*) yang ditargetkan selesai pada akhir tahun 2023 dalam bentuk Peraturan Presiden.

Pengaturan Saling Pengakuan ASEAN mengenai Uji Tipe untuk Produk Otomotif

ASEAN Mutual Recognition Arrangement on Type Approval for Automotive Products yang selanjutnya disingkat APMRA adalah kesepakatan terkait uji tipe kendaraan bermotor yang diakui oleh sesama negara anggota ASEAN.

Berkaitan dengan penandatanganan APMRA yang dilakukan oleh Menteri Perdagangan Indonesia pada 16 Januari 2021, menjadikan Indonesia, selaku subjek hukum internasional, perlu melakukan adaptasi dari peraturan sesuai dengan ketentuan hukum nasional melalui proses ratifikasi. Dengan meratifikasi APMRA tersebut ke dalam peraturan nasional maka akan terbentuk dasar hukum bagi Pemerintah Indonesia dalam pengimplementasiannya.

Saat ini APMRA telah diratifikasi oleh 3 negara yaitu Vietnam, Thailand, dan Myanmar. Beberapa Negara Anggota ASEAN juga telah menandatangani *Agreement 1958* antara lain Malaysia, Thailand, dan Filipina. Vietnam direncanakan akan ikut tanda tangan pada bulan Agustus 2023. Dengan meratifikasi Pengaturan tersebut, Indonesia memperoleh manfaat yang besar bagi peningkatan taraf ekonomi negara melalui sektor jasa, perdagangan, aliran modal dan investasi yang didukung oleh transportasi yang cepat, tertib, lancar, aman dan selamat.(*)



Dirjen Hubdat Hendro Sugiatno, didampingi Direktur Prasarana Transportasi Jalan Popik Montanansyah melakukan kunjungan kerja ke Terminal Tipe A Arjosari Malang, 8/4/2023. Foto: HMS DJPD/MAD



Dirjen Hubdat Hendro Sugiatno, didampingi Direktur Prasarana Transportasi Jalan Popik Montanansyah melakukan kunjungan kerja ke Terminal Tipe A Purabaya Surabaya, 8/4/2023. Foto: HMS DJPD/MAD

Soft Launching Aplikasi Penerbitan Surat Persetujuan Berlayar (SPB) Online Pada Lintas Penyeberangan Merak - Bakauheni, Jakarta, 13/4/2023. Foto: HMS DJPD/BYU





▶ Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi melepas keberangkatan bus mudik gratis Kementerian Perhubungan di Terminal Jatijajar, Depok, 18/4/2023. Foto: HMS DJPD/BYU



▲ Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi melepas keberangkatan bus mudik gratis Kementerian Perhubungan di Terminal Jatijajar, Depok, 18/4/2023. Foto: HMS DJPD/BYU



▶ Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi dalam acara Konversi Skuter Listrik Karya Anak Bangsa Menuju Pasar Eropa, Jakarta, 5/6/2023. Foto: HMS DJPD/BYU



▲ Kasubdit Promosi dan Kemitraan Iwan Budiyo dalam kegiatan Pentas Edukasi Transportasi 2023 dengan tema Bangun Budaya Keselamatan Bertransportasi Jalan, Jakarta, 13/6/2023. Foto: HMS DJPD/TOL



▲ Sesditjen Perhubungan Darat Amirulloh memimpin Rapat Audiensi Dinas Koperasi Kota Probolinggo di Ruang Kahuripan, Kantor Kemenhub, Jakarta, 14/6/2023. Foto: HMS DJPD/TOL



▶ Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, Anggota Komisi V DPR RI Sujadi, Bupati Purworejo Agus Bastian, Direktur Jenderal Perhubungan Darat Hendro Sugiatno, serta pejabat terkait lainnya pada saat Ground Breaking Terminal Purworejo, 21/5/2023. Foto: HMS DJPD/BYU

► Serah Terima Jabatan Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat di Lingkungan Ditjen Perhubungan Darat, Jakarta, 23/5/2023. (BYU)



▲ Keikutsertaan Ditjen Perhubungan Darat pada INAPA 2023, Transport and Logistic Indonesia 2023, JIEXPO Kemayoran Jakarta, 24-26 Mei 2023. Foto: HMS DJPD/BYU



Sesditjen Perhubungan Darat Amirulloh menerima audiensi Anggota DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara di Ruang Kahuripan, Jakarta, 26/6/2023. Foto: HMS DJPD/TOL

Media Briefing Angkutan Umum Perkotaan dengan Skema Buy The Service "Teman Bus" di Press Room, Jakarta, 27/6/2023. Foto: HMS DJPD/TOL



► Dirjen Perhubungan Darat Hendro Sugiatno, didampingi Plt. Direktur Prasarana Transportasi Jalan Susanty Pertiwi, Kepala BPTD Kelas II Jawa Tengah Eko Agus Susanto, Bupati Blora Arief Rohman dan pejabat terkait lainnya pada saat Ground Breaking Terminal Cepu, Blora, 16/6/2023. Foto: HMS DJPD/TOL

